

**Wiwin priana**

Buku Ajar

# EKONOMI REGIONAL

September 2023

**Daftar isi**

- 1. Pendahuluan**
- 2. Pengertian dasar ekonomi daerah**
- 3. Kerangka Ekonomi Regional**
- 4. Pembangunan ekonomi regional**
- 5. Permasalahan ekonomi regional**
- 6. Kambatan kerjasama regional**
- 7. Mudik mendorong ekonomi regional**
- 8. Peran ekonomi regional terhadap pemerintah**
- 9. Toll mendorong ekonomi Regional**
  
- 10. Pengungsi mendorong ekonomi regional suatu Negara**
- 11. Model, Model Pembangunan Regional**
  
- 12. Pembangunan regional sangat penting suatu negaara**

## **Kata Pengantar**

**Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah maka penulis telah menyelesaikan buku ekonomi regional ini**

**Terima kasih bagi teman teman yang membantu buku ini dan kami sadar buku ini masih banyak kekurangan untuk itu mohon kritik yang membangun.**

**Penulis**

**2 september 2023**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Wiwin priana', written over a horizontal line.

**Wiwin priana**

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Apakah ekonomi Regional

Ekonomi regional merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur-unsur perbedaan potensi suatu wilayah terhadap wilayah lain (Tarigan, 2005).<sup>6</sup> Des 2020

Ilmu Ekonomi Regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu **cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain**

Walaupun pemikiran ke arah ini telah dicetuskan oleh beberapa pengarang terdahulu antara lain: Weber (1929), Ohlin (1939), dan Losch (1954), namun demikian diakui secara umum bahwa Walter Isard dianggap sebagai bapak dari Ekonomi Regional dengan diterbitkannya disertasi beliau di Harvard yang berjudul "Location and Space".

**Region** sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti daerah, wilayah, atau kawasan tertentu. Oleh karenanya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa **regional** berarti merujuk kepada suatu kawasan atau wilayah tertentu. Kata **regional** memang merujuk pada suatu kawasan. Kawasan disini memang tidak dispesifikkan luasnya

Mengapa Indonesia dikatakan satu regional?

**Indonesia** sebagai bagian dari wilayah di permukaan bumi dianggap sebagai suatu **region** berdasarkan kenyataan bahwa antar bagian wilayah **Indonesia** mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya keamanan iklim, keamanan letak, kesamaan bahasa dan ideology, kesamaan budaya, dan yang paling penting secara hukum antar bagian ...

Apa perbedaan regional dan nasional?

Pembahasan. Arti dari **nasional** adalah bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Arti dari **regional** adalah bersifat daerah. Sedangkan arti dari internasional adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia.

**Tujuan dari pendekatan regional** adalah untuk membandingkan berbagai wilayah atau kawasan di berbagai tempat dengan memperhatikan aspek-aspek seperti aspek keruangan dan lingkungan dari berbagai macam wilayah secara komprehensif

Apa saja ruang lingkup geografi regional?

### **Ruang lingkup geografi regional**

Sederhananya, **geografi regional** membahas aspek fisik dan manusia dalam relasi keruangan di suatu wilayah. Kajian **geografi regional** membuat para ahli mampu menginterpretasikan dan menganalisis karakteristik suatu wilayah. Sehingga diketahui perbedaan **yang** jelas antarwilayah.

saja ruang lingkup geografi regional?

### **Ruang lingkup geografi regional**

Sederhananya, **geografi regional** membahas aspek fisik dan manusia dalam relasi keruangan di suatu wilayah. Kajian **geografi regional** membuat para ahli mampu menginterpretasikan dan menganalisis karakteristik suatu wilayah. Sehingga diketahui perbedaan **yang** jelas antarwilayah.

## **Ilmu regional**

---

**Ilmu regional** adalah bidang ilmu sosial yang terpusatkan dengan pendekatan analitis masalah secara khusus yaitu perkotaan, pedesaan, dan regional. termasuk ilmu pengetahuan regional sendiri, tetapi tidak terbatas pada teori lokasi atau ekonomi spasial, pemodelan lokasi, transportasi, analisis migrasi, penggunaan lahan dan pembangunan perkotaan, analisis industri luar, analisis lingkungan dan ekologi, pengelolaan sumber daya, analisis kebijakan daerah dan perkotaan, informasi geografis sistem, dan analisis data spasial. Dalam arti luas, setiap analisis sosial yang memiliki dimensi spasial dipakai oleh ilmuwan regional.<sup>[1]</sup>

Ilmu regional dicetuskan pada akhir [1940an](#). ketika ketidakpuasan perekonomian yang muncul dengan menunjukkannya level terbawah terhadap analisis ekonomi regional dan merasa harus ditingkatkan kembali. kemungkinan pada era ini, para pencetus ilmu regional diharapkan dapat menarik minat masyarakat dari berbagai teori ilmu lain.<sup>[1]</sup>

**Ilmu Ekonomi Regional** adalah bagian dari ilmu ekonomi, dimana secara spesifik membahas tentang pembatasan wilayah ekonomi dari suatu [Negara](#) dengan mempertimbangkan kondisi dan [sumber daya alam](#) serta sumber daya manusia yang tersedia disetiap wilayah ekonomi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas tentang kegiatan individu, tetapi melainkan menganalisis suatu wilayah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan potensi yang beragam yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Pembatasan pembatasan pembasahan ekonomi regional selalu menekankan pada barang barang ekonomi.<sup>[[butuh rujukan](#)]</sup>

Fokus ilmu regional [**What commodities shall be produced and in what quantities?** ( barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak) Hal ini bersangkut paut dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada dalam masyarakat.

- 
- **How shall goods be produced?** ( bagaimana atau oleh siapa barang itu diproduksi ). Hal ini bersangkut paut dengan pilihan teknologi untuk menghasilkan barang tersebut dan siapa saja yang berperan dalam menghasilkan barang tersebut dan apakah ada pengaturan dalam pembagian peran itu.
  - **For whom are goods to be produced?** ( untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil dari kegiatan memproduksi barang tersebut ). Hal ini bersangkut paut dengan pengaturan system balas jasa, system perpajakan subsidi, bantuan kepada fakir miskin dan lain-lain.

- **When do all those activities be carried out?** ( kapan berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan). Pertanyaan ini dijawab dengan menciptakan teori ekonomi dinamis dengan memasukan unsure waktu kedalam analisis. Sejalan dengan itu keluarlah teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi (, seperti tahap-tahap pertumbuhan Rostow), dan .
- **Where do all those activities should be carried out?**, yaitu dimana lokasi dari berbagai kegiatan tersebut. Dalam ilmu ekonomi regional untuk memecahkan masalah khusus yang terpaut dengan pertanyaan dimana diabaikan dalam analisis ekonomi tradisional. Ilmu Ekonomi Regional menjawab diwilayah mana suatu kegiatan sebaiknya dapat dilaksanakan.<sup>[2]</sup>

#### Tujuan utama Ilmu Ekonomi Regional

Menciptakan full employment atau setidaknya – tidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri/status bagi yang bekerja.

- 
- Adanya economic growth (pertumbuhan ekonomi), karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan, manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal.
  - Terciptanya price stability (stabilitas harga) untuk menciptakan rasa aman/tentram dalam perasaan masyarakat. Harga yang tidak stabil membuat masyarakat merasa waswas, misalnya apakah harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras, nilai riil atau manfaat berkurang di kemudian hari.

Ferguson (1965), mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah:

1. **Full Employment** setidaknya-tidaknnya dengan tingkat pengangguran rendah menjadi tujuan pokok pemerintahan pusat maupun daerah.<sup>2</sup>
2. **Economic Growth** akan menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan.
3. **Price Stability** untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat.<sup>[2]</sup>

Tujuan ekonomi daerah regional[]

---

Ada di antara tujuan ekonomi yang tidak mungkin dilakukan daerah (pemerintah daerah) apabila [daerah](#) itu bekerja sendiri, yaitu menstabilkan tingkat harga kenapa ? Namun apabila daerah itu dapat memenuhi tujuan pertama dan kedua hal tersebut akan membantu pemerintah pusat untuk memenuhi tujuan ketiga kenapa ? Namun di sisi lain, daerah karena wilayahnya yang lebih sempit, dapat dibuat kebijakan yang lebih bersifat spasial sehingga ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh daerah secara lebih baik daripada oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang bisa diatur di daerah:

1. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup.
2. Pemerataan pembangunan dalam wilayah.
3. Penetapan sektor unggulan wilayah.
4. Membuat keterkaitan antarsektor yang lebih serasi dalam wilayah, sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan.
5. Pemenuhan pangan wilayah.<sup>[3]</sup>

Manfaat Ilmu Ekonomi Regional dalam Perencanaan Wilayah dan Kota

---



Manfaat Ilmu Ekonomi Regional dalam Perencanaan Wilayah dan Kota antara lain, dapat membantu perencana untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan atau proyek. Ilmu Ekonomi Regional memiliki alat analisis yang dapat menunjukkan di bagian wilayah mana suatu kegiatan atau proyek memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, bagian wilayah yang perlu disurvei secara rinci dapat dipersempit untuk menghemat waktu dan biaya. Analisis dalam Ilmu Ekonomi Regional juga membutuhkan biaya yang relatif murah karena dalam banyak hal, analisisnya cukup menggunakan data-data sekunder. Dengan demikian, Ilmu Ekonomi Regional dapat membantu perencana untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses pemilihan lokasi.<sup>[4]</sup>

#### Referensi]

- 
1. <sup>^ a b</sup> Budiarjo, Miriam:" Dasar-dasar ilmu politik ". 1993
  2. <sup>^ a b</sup> Frick H, FX Bambang Suskiyanto:" Dasar-dasar Eko-arsitektur ". 1998
  3. <sup>^</sup> ["Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Regional"](#) <sup>[1]</sup> *date=Rabu, 22 November 2017*}}
  4. <sup>^</sup> Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Frick H, FX Bambang Suskiyanto, (1998), Dasar-dasar Eko-arsitektur, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
  - Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.

## **BAB II**

### **Pengertian Dsar**

#### *A. Latar Belakang*

*Munculnya Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan adalah karena adanya kelemahan dari ilmu ekonomi tradisional yang pada umumnya mengabaikan dimensi lokasi dan ruang (spaca) dalam analisisnya. Selain itu ilmu ekonomi menganggap bahwa struktur ekonomi wilayah dan perkotan adalah sama dengan struktur ekonomio nasional yang dalam kenyataan sukar diterima. Akibatnya, analisis ilmu ekonomi tradisional cenderung menjadi kurang realistis karena bagaimanapun adanya unsur lokasi dan ruang adalah jelas dan nyatanya dan memengaruhi kegiatan sosial-ekonomi. Aspek ini terutama sangat mempengaruhi analisis ekonomi pada daerah perkotan, dimana ruang yang tersedia relatif sempit sedangkan kepadatan penduduk sangat tinggi sehinga pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan (land-use) harua dilakukan lebih secra teliti.*

Mungkin kelemahan ini muncul karena para pendiri ilmu ekonomi pada awalnya banyak berasal dari Inggris seperti Adam Smith dan John Maynard Keynes, yang sudut pandangnya sangat dipengaruhi oleh kejayaan bangsa Inggris di masa lalu dalam menguasai wilayah. Mengingat kelemahan tersebut telah banyak para ahli untuk memasukan aspek lokasi dan tata ruang dalam analisis ekonomi tradisional. Langkah awal dilakukan oleh para ahli Jerman seperti Von Thunen (1851), Alfred Weber (1929) dan August Losch (1954) yang memasukkan aspek lokasi dan ruang kedalam analisis ekonomi mikro. Terutama diarahkan pada penentuan dan analisis lokasi dari kegiatan produksi dan permintaan serta penguasaan areal pasar. Upaya ini mendorong timbulnya ilmu baru yaitu perencanaan wilayah dan ekonomi. Walau pun telah berkembang dengan baik namun belum secara utuh dapat digunakan karena analisis teori lokasi kebanyakan bersifat mikro dengan menfokuskan diri pada analisis lokasi kegiatan perusahaan industri dan pertanian. Sedangkan ilmu ekonomi telah mencakup teori ekonomi makro dengan analisis yang bersifat menyeluruh meliputi wilayah dan kota maupun perkotaan nasional secara keseluruhan. Upaya untuk memasukan dimensi ruang kedalam analisis ekonomi secara komprehensif dimulai oleh Walter Isard dalam disertasinya yang berjudul *Location And Space-Economy* (1956). Ia mencoba memasukan unsur ruang dalam analisisnya yang bersifat parsialmaupun dalam kerangka analisis keseimbangan umum (*General Equilibrium Framework*). Sejak itulah ilmu ini menekankan pembahasan pada pengaruh aspek lokasi dan ruang dalam analisis dan pengambilan keputusan ekonomi.

#### 1. B. Permasalahan Pokok Ilmu Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai permasalahan pokok, sebagaimana diungkap oleh Case dan Fair (2003) ilmu ekonomi yang tradisional mempunyai tiga pertanyaan pokok mendasar dan perlu dijawab secara tepat yaitu *What, How and Who*.

Permasalahan pertama adalah menyangkut dengan apa (*what*) yang akan diproduksi, dari sini muncul produksi yang merupakan salah satu bagian penting dalam ilmu ekonomi. Permasalahan kedua adalah menyangkut dengan pertanyaan bagaimana (*how*) barang tersebut diproduksi. Pertanyaan ini menimbulkan masalah penggunaan dan kombinasi input yang merupakan faktor utama yang mendorong kegiatan produksi. Termasuk dalam pertanyaan ini adalah teknologi produksi bagaimana sebaiknya digunakan, apakah padat karya atau padat modal. Pertanyaan ketiga adalah siapa (*who*) yang akan menggunakan hasil produksi tersebut yang menyangkut dengan aspek lokasi dan pemasaran hasil produksi.

Ilmu ekonomi yang lebih modern mencoba menjawab pertanyaan lain yaitu: kapan (*when*) sebaiknya barang tersebut diproduksi. Sehingga mendorong munculnya analisis ekonomi yang bersifat dinamis (*Dynamic Economic Analysis*) dengan mempertimbangkan unsur waktu dan analisis tingkat laku ekonomi. banyak diterapkan dalam teori pertumbuhan ekonomi (*Growth Theory*) dan analisis perencanaan pembangunan baik nasional maupun perkotaan.

Namun demikian, pertanyaan yang penting dan belum terjawab oleh ilmu ekonomi tradisional adalah dimana (*where*) kegiatan produksi itu harus dilakukan dan untuk memenuhinya pada daerah mana?. Pertanyaan ini sangat penting karena kondisi geografis dan tingkat upah buruh pada umumnya sangat bervariasi antara desa dan kota sehingga pemilihan lokasi menentukan tingkat efisiensi kegiatan produksi dan distribusi.

### *C. Peranan Ruang dalam Analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*

*Tidak dapat disangkal bahwa adanya ruang (space) adalah merupakan prasyarat mutlak dalam analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan pada tingkat wilayah. Terlebih lagi pada Negara yang mempunyai daerah cukup luas dan potensi geografis yang bervariasi, aspek ruang ini menjadi sangat penting sekali.*

*Aspek ruang yang muncul dalam Analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan dalam berbagai bentuk. Dalam analisis yang bersifat mikro, unsure ruang muncul dalam bentuk analisis lokasi perusahaan, luas area pasar, kompetisi antar tempat dan penentuan harga tempat. Sedangkan analisis makro unsure ruang ditampilkan dalam bentuk Analisis Konsentrasi Industri, Monilitas Regional, dan Analisis Pusat Pertumbuhan.*

*Untuk dapat menghasilkan analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan yang lebih konkret dan terukur, unsure ruang dapat ditampilkan dalam variable ongkos angkut yang sangat dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh. Sedangkan, jarak yang dianalisis umumnya dari lokasi bahan baku kelokasi pabrik dan selanjutnya kepasar, maupun dari daerah pemukiman kepasar atau tempat kerja.*

*Variable selanjutnya yang juga dapat mewakili unsure ruang dalam analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan adalah perbedaan struktur dan potensi social-ekonomi antar wilayah. Perbedaan ini bersifat lumrah dan terjadi di seluruh Negara, baik yang sudah maju maupun sedang berkembang.*

*Variabel penting lainnya adalah Interaksi social-ekonomi Antar wilayah. Interaksi antar wilayah ini dapat terjadi dalam empat bentuk, yakni: (a) perdagangan antar daerah, (b) perpindahan tenaga kerja atau migrasi, (c) lalu lintas modal, dan (d) distribusi inovasi antar wilayah.*

#### *D. Konsep Wilayah sebagai Representasi Ruang*

*Untuk dapat mewujudkan analisis yang baik dan harmonis, konsep wilayah digunakan sebagai representasi unsure ruang. Dalam hal ini, wilayah diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsure tertentu tergantung dari tujuan analisis. Unsur tertentu tersebut dapat menyangkut dengan kondisi social-ekonomi maupun keterkaitan antar wilayah.*

*Berdasarkan beberapa unsure utama yang perlu dipertimbangkan dalam pengelompokan wilayah tersebut, maka secara umum terdapat tempat bentuk wilayah yang banyak digunakan dalam Analisis Wilayah dan Perkotaan, yaitu:*

- 1. Homogeneous Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk dengan memperhatikan kesamaan karakteristik social-ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan.*
- 2. Nodal Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan keterkaitan social-ekonomi yang erat antar daerah.*
- 3. Planning Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah.*
- 4. Administrative Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan.*

#### *E. Perbedaan Struktur Wilayah Dan Kota*

*Tidak dapat disangkal bahwa struktur dan kondisi wilayah adalah berbeda dengan daerah perkotaan. Dari sudut perekonomian wilayah, seperti provinsi dan kabupaten, ternyata struktur ekonominya didominasi oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, termasuk tanaman pangan,*

*perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sedangkan struktur perekonomian daerah perkotaan umumnya didominasi oleh kegiatan industri, perdagangan dan jasa, termasuk transportasi dan komunikasi, perumahan dan jasa keuangan. Perbedaan struktur ekonomi ini perlu dipertimbangkan karena peralatan analisis dan kebijakan yang diperlukan dalam pembahasan ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan juga menjadi sangat berbeda.*

*Dari segi penataan ruang juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Pada analisis wilayah, cakupan ruangnya cukup luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah yaitu rata-rata di bawah 100 orang untuk setiap km persegi sehingga penataan ruang dapat diatur secara lebih mudah. Dalam hal ini perhatian lebih banyak diberikan pada penentuan kawasan hutan lindung (konservasi), hutan produksi dan jaringan transportasi. Sedangkan pada daerah perkotaan luas ruang yang tersedia umumnya lebih kecil sedangkan kepadatan penduduk relatif tinggi, yaitu rata – rata di atas 100 orang untuk setiap km persegi. Akibatnya, pengaturan tata ruang dan penggunaan lahan harus dilakukan secara lebih rinci dan hati – hati, karena dapat membawa implikasi yang cukup besar terhadap efisiensi penggunaan lahan dan kualitas lingkungan hidup daerah perkotaan.*

*Perbedaan struktur wilayah dan kota ini membawa implikasi yang sangat besar, baik dari segi analisis maupun formulasi kebijakan dan perencanaan. Dari segi analisis ekonomi, perbedaan struktur wilayah ini memberikan implikasi bahwa pada tingkat wilayah analisis akan lebih banyak berkaitan dengan sektor pertanian yang tidak banyak mengalami perubahan teknologi. Pada formulasi kebijakan dan perencanaan, pada tingkat wilayah peranan aspek lokasi dan ruang tidak terlalu banyak. Sedangkan pada tingkat kota aspek lokasi dan tata ruang menjadi sangat menonjol sekali.*

*Dalam analisis ekonomi perkotaan, perlu pula dibedakan antara daerah perkotaan (urban areas) dengan kota (city). Dimana perbedaan antara wilayah dan daerah perkotaan terdapat pada struktur ekonomi dan kepadatan penduduk yang berimplikasi besar pada permasalahan dan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Sedangkan kota pada dasarnya adalah merupakan wilayah administrasi dari suatu daerah perkotaan. Kota dapat pula dibedakan berdasarkan jumlah penduduknya, yaitu kota kecil, kotamadya, dan kota besar (metropolitan) yang juga mempunyai implikasi cukup besar terhadap permasalahan dan perumusan kebijakan.*

#### *F. Model Ekonomi Wilayah*

*Sama dengan analisis ekonomi, perkembangan analisis Ekonomi Wilayah memperlihatkan adanya tendensi penggunaan metode kuantitatif yang semakin intensif. Ini disebabkan karena logika analisis ekonomi ternyata sejalan dengan logika ilmu matematika. Karena itu, penggunaan peralatan matematika dan statistika tidak dapat dielakkan dan turut pula memengaruhi perkembangan analisis Ekonomi wilayah. Akibat penggunaan matematika dan statistika dalam analisis Ekonomi Wilayah juga menjadi semakin meningkat di samping penggunaan peralatan analisis kurva bersifat tradisional.*

*Namun dalam hal yang suskar dikuantitatifkan, analisis kualitatif masih tetap dapat digunakan. berbeda dengan analisis Ilmu Ekonomi tradisional, penggunaan gambar dan peta cenderung lebih banyak dilakukan dalam Analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan untuk dapat merepresentasikan secara konkret unsur lokasi dan ruang ke dalam analisis. Untuk formulasi teori yang bersifat sederhana, penggunaan kalkulus banyak dilakukan yang ditunjang dengan analisis kurva. sedangkan untuk analisis yang lebih sulit dan mencakup unsur waktu, penggunaan metode optimasi dinamis (dynamic optimization) akan banyak dilakukan.*



*Sedangkan untuk analisis fakta dan model empirik yang memerlukan data kuantitatif, penggunaan metode statistik dan ekonometrik akan sangat membantu. Karena itu analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan juga banyak menggunakan model-model kuantitatif yang terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait satu sama lainnya (simultaneous equation), sebagaimana lazimnya dilakukan dalam analisis Ilmu Ekonomi Modern dewasa ini.*

*Tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa keuntungan bila menggunakan analisis kuantitatif dibandingkan dengan analisis kualitatif. Pertama, analisis kuantitatif akan dapat membuat analisis menjadi lebih jelas, konkret dan dapat diukur sehingga analisis menjadi lebih tajam dan lebih bersifat operasional. Kedua, melalui analisis kuantitatif asumsi dan persyaratan yang melandasi suatu teori menjadi lebih jelas sehingga penerapan konsep dalam praktiknya akan lebih tepat dan terarah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh teori bersangkutan. Ketiga, dengan menggunakan analisis kuantitatif, proyeksi dan peramalan masa depan akan dapat pula dilakukan secara lebih konkret dan terukur. Dengan demikian, analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan akan dapat digunakan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota.*

#### *G. Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan Sebagai Cabang Ilmu Ekonomi*

*Menggunakan sistem dan tata cara ilmiah, suatu ilmu akan dapat diakui keberadaannya sebagai suatu ilmu lain yang berdiri sendiri adalah bilamana ilmu tersebut mampu memberikan konsep-konsep teori, metodologi dan analisis empirik yang jelas perbedaannya dibandingkan dengan ilmu lainnya. Suatu ilmu dikatakan sebagai cabang ilmu bila ilmu tersebut dapat memperluas analisis dengan menggunakan landasan teori dan konsep dasar yang sama. Prinsip keilmuan*

*yang demikian umumnya berlaku pada sebagian besar ilmu pengetahuan, baik ilmu pasti ataupun ilmu sosial, walaupun untuk beberapa ilmu tertentu akan terdapat pengecualian.*

*Memerhatikan prinsip tersebut, Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan dewasa ini sudah dapat diakui keberadaannya sebagai suatu ilmu yang terpisah dan berdiri sendiri karena teori, metodologi dan analisis empirik yang dikeluarkan tidak sama dengan Ilmu Ekonomi Tradisional. Dengan memasukan unsur tata ruang (space) dan penentuan lokasi ke dalam analisis, maka teori – teori baru yang dapat dihasilkan antara lain adalah: Teori Harga Spesial, Teori Produksi Spasial, Mobilitas Barang dan Faktor Produksi Antar daerah, Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, Pusat Pertumbuhan, Teori Penggunaan Lahan (Lahan-used), Teori Perumahan, Transportasi Perkotaan ( Urban Transportation), dan lainnya.*

*Sedangkan dalam aspek metodologi, Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan menampilkan pula hal-hal yang juga mempunyai karakteristik tersendiri, seperti: Analisis Konsentrasi Industri, Regional Input-output Analysis, Shift-share Analysis, Interregional Programming Model, Regional Econometric Model, Gravity Model, Land-Use Mode, Transportation Model dan lain-lainnya. Semua ini mebenarkan bahwa Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan sudah pantas dan layak dianggap sebagai yang berdiri sendiri.*

*Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan ini dapat dianggap sebagai cabang dari Ilmu Ekonomi karena teori dasar yang digunakan adalah sama yaitu Teori Ekonomi baik Mikro maupun Makro yang dikombinasikan dengan Teori Lokasi dan Tata Ruang. Kombinasi kedua teori ini menimbulkan perkembangan baru dalam Ilmu Ekonomi dengan adanya analisis spesial baik untuk kegiatan produksi maupun harga. David Leahy (1970) menyebut kombinasi ini sebagai Spatial Economic Theory yaitu suatu cabang teori ekonomi yang memasukan unsur ruang (space) secara konkret ke dalam analisisnya. Dengan demikian, terlihat bahwa Ilmu Ekonomi*

*Wilayah dan Perkotaan merupakan perluasan pada aspek tertentu terhadap analisis Teori Ekonomi (Mikro dan Makro) yang bersifat tradisional. Tidak mengherankan bila kerangka berfikir dan beberapa teori ekonomi dasar banyak yang masih digunakan sebagai landasan dalam analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.*

#### *H. Pengertian Ilmu Ekonomi Wilayah Dan perkotaan*

*Ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan dapat diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada pengaruh aspek ruang kedalam analisis ekonomi dengan focus pembahasan pada tingkat wilayah (provinsi dan kabupaten) dan daerah perkotaan. Ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan sebenarnya merupakan pengembangan ilmu ekonomi tradisional kepada aspek tertentu, yaitu aspek lokasi dan tataruang, ilmu ekonomi wilayah ini merupakan gabungan ilmu ekonomi tradisional dengan teori lokasi dan tataruang.*

*Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, dapat diberikan tiga pendekatan, yaitu: Mencoba mendefinisikan ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan dengan melihat kemungkinan untuk melakukan suatu disiplin ilmu yang terpisah seperti yang dilakukan oleh professor walter irsad (1960). Disini pembahasan cenderung dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas dengan memasukkan ilmu seperti geografi, ilmu ekonomi, ilmu lingkungan hidup, transportasi dan ilmu social. Karena pendekatan ini, kelompok ini cenderung menamakan dirinya dengan ilmu regional yang bersifat multidisipliner. Penyusunan ilmu ekonomi berdasarkan sekelompok permasalahan spesifik dalam bidang ekonomi yang akan dipecahkan. Dalam hal ini ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan didefinisikan sebagai suatu ilmu yang membahas semua persoalan yang dihadapi oleh suatu wilayah dan kota tertentu dari sudut pandang ilmu ekonomi.*

*Mencoba menyusun ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan secara lebih komperhensif menuju pembentukan teori keseimbangan umum ruang. Dalam hal ini ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada aspek wilayah.*

*Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, dubei vinod (1964) mendefenisikan ilmu wilayah dan perkotaan sebagai pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu kota atau wilayah dari pada perkembangan ilmu ekonomi secara murni yang kebanyakan lebih bersifat teoritis dan konsepsional.*

#### 1. I. *Sifat Ilmu Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*

*Ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan pada dasarnya bersifat multidisipliner karena didalamnya melibatkan beberapa cabang ilmu lain yang terkait. Jika terdapat suatu permasalahan, tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu saja. Sifat multidisipliner tersebut yang menyebabkan peminat ilmu ini datang dari berbagai disiplin ilmu, baik dari ilmu ekonomi, planologi, teknik, pertanian, ilmu social, dan geografi.*

*Karena itu tidaklah mengherankan bilamana cakup ananalisis ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan cenderung menjadi lebih luas tergantung permasalahan yang dihadapi oleh suatu wilayah dan kota tertentu. Disamping itu, penerapan ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan tersebut juga memerlukan kerjasama yang erat dengan bidang keahlian yang lain, dan pemanfaatannya menjadi kurang operasional dan tepat sasaran bila diterapkan secara terpisah khusus untuk ilmu ekonomi saja.*

#### J. Asumsi Umum Melandasi Analisis

Karena ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan adalah bagian dari ilmu ekonomi tradisional, kebiasaan yang digunakan oleh para ekonom juga digunakan dalam pembahasan ilmu ini. Salah satunya yang juga digunakan dalam analisis ekonomi wilayah dan perkotaan adalah penggunaan asumsi sebagai landasan analisis. Penggunaan asumsi ini diperlukan untuk menunjukkan dalam kondisi yang bagaimana teori tersebut berlaku. Alasan lain adalah bahwa dalam ilmu sosial, objek analisis biasanya tidak dapat dikontrol atau dikendalikan sebagaimana halnya dalam analisis ilmu eksakta.

Salah satu asumsi yang banyak digunakan oleh para ekonom adalah *ceteris paribus* (other things being equal) yang berarti faktor dan unsur lain tidak berubah. Asumsi ini sering digunakan dalam analisis permintaan dimana beberapa unsur tertentu yang sukar di ukur dianggap tidak berubah seperti; selera dan harapan masyarakat.

Hal yang sama juga terjadi dalam pembahasan fungsi produksi yang seringkali hanya menggunakan dua variabel (unsur) penentu, yaitu modal dan tenaga kerja. Unsur lain dalam kenyataannya juga mempengaruhi yaitu tanah dan kewirausahaan.

Dalam kenyataannya ruang tidak hanya satu dimensi (linear) tetapi dapat terjadi dalam dua dimensi (nonlinear space). Tetapi asumsi ini tetap digunakan untuk mempermudah analisis. Demikian pula dengan asumsi “lota dengan satu pusat” (monocentric city) yang juga tidak selali benar karena banyak kota besar yang mempunyai beberapa pusat kota atau pasar (multicentric city).

Karena itu, analisis ekonomi wilayah dan perkotaan juga banyak menggunakan model kuantitatif yang terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait (simultaneous equation). Tidak dapat disangkal ada beberapa keuntungan bila menggunakan analisis kuantitatif dibandingkan dengan analisis kualitatif. *Pertama*, analisis kuantitatif akan dapat membuat analisis

menjadi lebih jelas, kongkret dan dapat diukur dan lebih bersifat operasional. *Kedua*, melalui analisis kuantitatif asumsi dan persyaratan yang melandasi suatu teori menjadi lebih jelas sehingga penerapan konsep dalam praktiknya akan lebih tepat dan terarah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh teori bersangkutan. *Ketiga*, dengan menggunakan analisis kuantitatif, proyeksi dan peramalan masa depan akan dapat pula dilakukan secara lebih kongkret dan terukur. Dengan demikian, analisis ekonomi wilayah dan perkotaan akan dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada tingkat provinsi , kabupaten dan kota.

## **Bab III**

### **KERANGKA EKONOMI REGIONAL**

#### 1. Kerangka Teori Pembangunan Ekonomi Regional

Untuk melihat kinerja perekonomian suatu wilayah atau suatu propinsi biasanya digunakan indikator-indikator makroekonomi, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan (Tarigan, 2004). Dalam konteks analisis input-output regional dan tampilan struktur ekonomi daerah dalam tabel input-output regional, maka beberapa

pengertian yang dianggap layak untuk dibahas dalam rangka menganalisis kinerja perekonomian suatu daerah atau propinsi adalah : (1) pertumbuhan ekonomi ekonomi daerah atau regional, (2) pendapatan daerah berupa produk domestik regional bruto (PDRB), dan (3) distribusi pendapatan.

### 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pengertian pertumbuhan ekonomi pada dasarnya terkait dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pertumbuhan menyangkut perkembangan berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi (output) dan pendapatan. Berbeda dengan pembangunan ekonomi, yang mengandung arti lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

- Pendapatan daerah atau pendapatan regional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah pada tahun tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi daerah yang terjadi dari tahun ketahun. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah kita harus membandingkan pendapatan daerah tersebut dari tahun ke tahun.
- Dalam membandingkan besarnya nilai pendapatan daerah di suatu daerah, haruslah diketahui bahwa perubahan nilai pendapatan daerah yang terjadi dari

tahun ke tahun tersebut, dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu; (1) perubahan tingkat kegiatan ekonomi, dan (2) perubahan harga-harga. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan dan perkembangan, perlu diidentifikasi penyebab perubahan pada nilai pendapatan daerah.

- Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan pendapatan daerah didasarkan atas harga konstan. Kalau perhitungan pendapatan daerah menggunakan tingkat harga yang berlaku pada waktu tersebut, hasil perhitungannya adalah pendapatan daerah menurut harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. Jadi perhitungan pendapatan daerah dapat menggunakan harga konstan (pendapatan riil), dapat pula menggunakan harga yang berlaku saat itu (pendapatan nominal).
- Perhitungan pendapatan daerah riil bisa diperoleh dengan cara mendeflasikan pendapatan daerah nominal (menurut harga yang berlaku), yaitu dengan



menilainya kembali berdasarkan atas harga-harga pada tahun dasar tertentu (base year). Sebagai contoh, pendapatan riil daerah-daerah ( propinsi-propinsi) di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik menggunakan tahun dasar 1993, misalnya PDRB Jambi 2003 atas dasar harga konstan tahun 1993. Cara yang paling mudah untuk mendeflasikan pendapatan regional atau pendapatan daerah adalah dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK). IHK ini merupakan indeks yang menunjukkan perubahan harga-harga dari berbagai barang yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu. Angka indeks pada tahun dasar (base year) selalu dinyatakan dengan angka 100. Berdasarkan pada perbandingan tingkat harga pada tahun dasar tersebut dengan tingkat harga pada tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya, maka angka indeks pada tahun-tahun lainnya akan bisa diperoleh.

Dengan menggunakan IHK, pendapatan riil suatu daerah dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

dimana  $Y_t$  adalah pendapatan daerah riil pada tahun  $t$ ,  $Y_{bt}$  adalah pendapatan daerah menurut harga yang berlaku pada tahun  $t$ , dan  $IHK_t$  adalah indeks harga konsumen pada tahun  $t$ .

Setelah nilai riil pendapatan daerah berbagai tahun bisa diperoleh, maka tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun bisa ditentukan. Laju pertumbuhan

ekonomi pada suatu tahun tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

dimana  $G_t$  adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dinyatakan dalam persen,  $Y_{rt}$  adalah pendapatan daerah riil pada tahun  $t$ , dan  $Y_{rt-1}$  adalah pendapatan daerah riil pada tahun  $t-1$ .

Setelah mengetahui tingkat pendapatan daerah untuk berbagai tahun, maka perhitungan pendapatan daerah per kapita bisa juga dilakukan. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pendapatan per kapita suatu daerah pada satu tahun tertentu bisa diperoleh dengan cara membagi pendapatan daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut pada tahun yang sama. Sedangkan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun dapat ditentukan dengan cara yang sama dengan perhitungan pertumbuhan pendapatan riil suatu daerah, yaitu :

dimana  $g_t$  adalah pertumbuhan pendapatan per kapita pada suatu daerah pada tahun  $t$  yang dinyatakan dalam persen,  $Y_{Pt}$  adalah pendapatan per kapita pada tahun  $t$ , dan  $Y_{Pt-1}$  adalah pendapatan perkapita pada tahun  $t-1$ . Disamping dengan cara di atas, cara lain yang dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan pendapatan perkapita adalah dengan cara mengurangkan laju pertumbuhan pendapatan daerah riil dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk

### 3.1.2. Pendapatan Regional

Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno, 1985). Sedangkan menurut Tarigan (2004), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah :

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB).

## 2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)

PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan yang lain-lainnya) karena barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan keseluruhan. Tetapi bila PDRN di atas dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka akan diperoleh PDRN atas dasar biaya faktor. Dalam perhitungan pendapatan regional dengan pendekatan nilai produksi, perlu dicermati agar tidak terjadi penghitungan ganda (double counting). Menurut Tarigan (2004) pendapatan masyarakat di suatu wilayah atau propinsi paling mudah dilihat dari nilai tambah suatu kegiatan produksi atau jasa yang meliputi upah atau gaji, laba, sewa tanah, bunga uang yang dibayarkan (berupa bagian dari biaya), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

### 1. Upah dan gaji

Upah dan gaji mencakup semua balas jasa dalam bentuk uang maupun barang dan jasa kepada tenaga kerja yang ikut dalam kegiatan produksi selain pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Laba atau keuntungan adalah total nilai penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Laba merupakan pendapatan bagi pengusaha.

### 3. Sewa Tanah

Sewa tanah adalah balas jasa yang diberikan kepada pemilik tanah atau lahan tempat dilakukannya proses produksi.

### 4. Bunga uang

Bunga uang adalah balas jasa terhadap modal yang digunakan dalam proses produksi.

### 5. Penyusutan

Pengertian penyusutan disini adalah penyusutan barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi. Penyusutan merupakan nilai penggantian terhadap penurunan nilai barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

### 6. Pajak tidak langsung neto

Pajak tidak langsung (indirect tax) adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan oleh pemerintah terhadap produsen berkenaan dengan produksi, penjualan, pembelian atau penggunaan barang dan jasa yang mereka kenakan pada pembiayaan produksi. Sedangkan pajak tidak langsung neto diperoleh dengan cara mengurangi pajak tidak langsung dengan subsidi.\

Metode perhitungan pendapatan regional secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Sedangkan metode tidak langsung menggunakan data yang bersumber dari data nasional yang dialokasikan ke masing-masing daerah. Ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung pendapatan regional dengan menggunakan metode langsung (Soediyono, 1992; Tarigan, 2004), yaitu :

#### 1. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah cara penentuan pendapatan regional dengan cara menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kalau dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan atau produksi barang dan jasa itu digunakan untuk : konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung; konsumsi pemerintah; pembentukan modal tetap bruto (investasi); perubahan stok, dan ekspor neto (total ekspor dikurangi dengan total impor). Total penyediaan (total barang dan jasa yang tersedia) didalam negeri adalah total barang yang diproduksi ditambah impor dikurangi ekspor. Karena yang akan dihitung hanyalah nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam negeri saja maka total konsumsi harus dikurangi dengan nilai impor kemudian ditambah dengan

nilai ekspor. Penjumlahan keenam unsur di atas disebut sebagai produk domestik regional bruto (PDRB).

## 2. Pendekatan Produksi

Perhitungan pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Untuk memudahkan perhitungan dan ketersediaan data, sektor-sektor produksi ini biasanya dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) atau Klasifikasi Komoditi Indonesia (KKI). Dalam konteks penyusunan neraca I-O atau SAM, sektor-sektor produksi bisa dipecah menjadi 11 sektor, 66 sektor, atau 172 sektor, sesuai dengan kebutuhannya.

Maka itu, untuk menghitung pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi, maka pertama-tama yang harus dilakukan ialah menentukan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor di atas. Pendapatan regional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang tercipta dari tiap-tiap sektor. Dalam menghitung PDRB dengan cara ini, yang dijumlahkan hanyalah nilai tambah produksi atau value added yang diciptakan masing-masing sektor. Dengan cara ini dapat dihindarkan perhitungan double counting. Disamping itu, dengan cara ini juga akan menunjukkan sumbangan yang sebenarnya dari tiap-tiap sektor dalam menciptakan produksi regional. Dalam konteks analisis I-O, perhitungan

PDRB dapat dilihat pada kwadran III, dan secara matematika dapat disajikan dalam persamaan berikut

$$:PDRB = VA_1 + VA_2 + VA_3 \dots\dots\dots + VA_n, \text{ atau}$$

dimana :  $VA$  = nilai tambah sektor produksi regional, dan  $i$  = jumlah sektor produksi regional. Dengan memasukkan kondisi lingkungan dalam model ini, maka persamaannya akan menjadi :

dimana : NBZ adalah manfaat bersih dari situasi lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan produksi. Manfaat bersih ini bisa bernilai negatif atau positif, tergantung dari apakah kegiatan produksi tersebut menimbulkan biaya lingkungan yang lebih besar atau lebih kecil bila dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkannya.

### 3. Pendekatan Penerimaan

Dengan cara ini pendapatan regional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Jadi yang dijumlahkan adalah: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

Perhitungan metode pendapatan regional dengan cara tidak langsung dilakukan dengan cara mengalokasikan pendapatan nasional (produk domestik bruto/PDB) ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB Indonesia ke setiap propinsi dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat digunakan adalah: nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/ subsektor, jumlah produksi



fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alat ukur tidak langsung.

### 3.1.3. Distribusi Pendapatan

Dalam teori ekonomi distribusi pendapatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) distribusi pendapatan institusional atau distribusi pendapatan personal , adalah distribusi pendapatan yang terjadi antar institusi maupun antar kelompok rumah tangga; dan (2) distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan faktorial, adalah distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi (Semaoen, 1992)

#### 1. Distribusi Pendapatan Personal atau Institusional

Distribusi pendapatan personal atau institusional adalah merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini hanya berkaitan dengan masing-masing individu atau satu kelompok masyarakat dan jumlah penghasilan yang mereka terima. Besarnya pendapatan personal yang diterima oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat, sangat tergantung dari kepemilikan faktor produksi. Individu dapat memberikan jasa tenaga kerja, keterampilan (manajemen), dan modal yang dimilikinya dalam suatu proses produksi. Imbalan terhadap digunakannya faktor produksi milik individu atau kelompok masyarakat adalah yang diterima sebagai pendapatan personal (Semaoen, 1992). Imbalan yang diterima oleh setiap individu atau kelompok masyarakat, dapat berupa : (1) upah atau gaji, sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi

dalam suatu proses produksi, (2) laba, deviden, bunga, sewa, dan lain sebagainya, atas imbalan penggunaan modal atau kapital, dan (3) pendapatan lain, atas imbalan yang dibayarkan untuk kepemilikan faktor produksi lainnya. Selanjutnya Todaro (1991), Yotopolus dan Nugent (1976), menggunakan Kurva Lorenz dan Koefisien Gini untuk mengukur distribusi pendapatan. Kurva Lorenz dapat menjelaskan distribusi pendapatan secara grafis, sedangkan Koefisien Gini mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi dengan melihat hubungan antara jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan dalam bentuk persentase kumulatif.

## 2. Distribusi Pendapatan Fungsional atau Faktorial

Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan faktorial ini menjelaskan distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Besarnya kecilnya pendapatan ini tergantung dari seberapa besar atau seberapa banyak faktor produksi yang digunakan, selain juga ditentukan oleh faktor harga faktor produksi. Dalam melakukan analisis distribusi pendapatan faktorial ini, produksi total dibagi habis dalam faktor produksi yang digunakan. Dalam konteks analisis SAM, ada dua faktor produksi yang digunakan yaitu modal dan tenaga kerja. Perubahan dalam pemakaian faktor produksi akan menyebabkan perubahan dalam distribusi pendapatan faktorial atau fungsional. Selanjutnya, pendapatan yang diterimakan

kepada masing-masing faktor produksi tersebut akan diterima oleh pemilik faktor produksi.

Semaoen (1992) mengatakan bahwa pengukuran distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan metode akuntansi dan dengan menggunakan fungsi produksi guna memperoleh andil faktor (factor share) dari setiap faktor produksi yang digunakan. Metode akuntansi dalam menghitung andil faktor setiap masukan (faktor produksi) memerlukan data mengenai jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dan balas jasa yang diterima oleh setiap faktor tersebut. Dalam perhitungannya, nilai produksi dialokasikan kepada setiap faktor produksi sebagai balas jasa dari penggunaan faktor produksi tersebut. Balas jasa terhadap faktor produksi ini, merupakan pendapatan dari masing-masing faktor tersebut, atau yang disebut sebagai pendapatan faktorial. Sebagai ilustrasi, pada Gambar 1. disajikan ilustrasi mengenai penerimaan personal dan fungsional yang diterima oleh rumahtangga petani pedesaan di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Wie (1981), negara yang semata-mata hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memikirkan pendistribusian pendapatan tersebut, akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan diantaranya adalah :

1. Ketimpangan pendapatan antar golongan atau ketimpangan relatif
- Ketimpangan yang terjadi antar golongan ini sering kali diukur dengan

menggunakan koefisien Gini. Kendati koefisien Gini bukan merupakan indikator yang ideal mengenai ketimpangan pendapatan antar berbagai golongan, namun sedikitnya angka ini dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola distribusi pendapatan

2. Ketimpangan pendapatan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan  
Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat juga ditinjau dari segi perbedaan pendapatan antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan (urban-rural income disparities). Untuk membedakan hal ini, digunakan dua indikator : (1) perbandingan antara tingkat pendapatan per kapita di daerah perkotaan dan pedesaan, dan (2) disparitas pendapatan daerah perkotaan dan daerah pedesaan (perbedaan pendapatan rata-rata antara kedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Menurut Bank Dunia, pola pembangunan Indonesia memang memperlihatkan suatu urban bias dengan tekanan berat pada sektor industri, yang merupakan landasan bagi ketimpangan distribusi pendapatan di kemudian hari.

3. Ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah  
Satu lagi sisi lain dalam melihat ketimpangan distribusi pendapatan nasional, adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan pula terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah (regional income disparities). Ketimpangan pendapatan seperti ini

disebabkan oleh karena penyebaran sumberdaya alam yang tidak merata serta perbedaan dalam laju pertumbuhan antar daerah, dan belum berhasilnya usaha-usaha pembangunan yang merata antar daerah di Indonesia. Perlu pula diperhatikan bahwa ketimpangan ini hanya menyajikan gambaran makro mengenai ketimpangan dalam tingkat pendapatan rata-rata antar berbagai daerah atau propinsi di Indonesia, dan tidak memperlihatkan pola distribusi pendapatan antara berbagai golongan masyarakat di dalam satu daerah atau propinsi.

Selanjutnya Arif (1978), ada delapan proses yang telah menimbulkan ketimpangan yang pada suatu wilayah ( pada level propinsi ataupun negara), diantaranya:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidak merataan pembangunan antar subwilayah (atau daerah yang lebih kecil).
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang intensif modal sehingga persentase pendapatan dari harta bertambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.

6. Pelaksanaan kebijaksanaan substitusi-impor industri yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.
7. Memburuknya term of trade bagi wilayah (daerah atau negara) yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan wilayah maju (daerah atau negara) sebagai akibat ketidak elastisan permintaan wilayah maju.
8. Hancurnya industri-industri rakyat, seperti: pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya.

Selanjutnya masih menurut Wie (1981), upaya dalam menanggulangi ketimpangan ini adalah dengan strategi campur tangan pemerintah. Dalam hal ini diupayakan pembagian yang merata dari sumberdaya-sumberdaya yang ada kepada golongan masyarakat termiskin, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat. Ada 3 cara untuk menanggulangi atau melakukan redistribusi ketimpangan pendapatan, yaitu

- :1. Redistribusi Non-Incremental. Hal ini menyangkut kebijaksanaan redistribusi harta yang ada, seperti : pemungutan pajak pendapatan secara progresif.
2. Redistribusi Inkremental. Cara ini digunakan dalam pemungutan pajak bagi golongan yang berpendapatan tinggi, yang selanjutnya dibagikan langsung kepada mereka yang kurang mampu. Kebijakan ini biasanya dianut oleh negara-negara sosialis.

3. Redistribusi melalui Pertumbuhan. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menaikkan laju pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat miskin, dengan tidak mengurangi secara absolut pendapatan total. Ada beberapa hal yang terkandung dalam kebijaksanaan ini, seperti : (1) mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi, (2) menstabilkan penghasilan golongan paling kaya, (3) menyalurkan sebagian pendapatan golongan kaya sebagai hasil pertumbuhan kedalam berbagai bentuk investasi, dan (4) mengalokasikan investasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi golongan masyarakat termiskin. Pada sisi lain redistribusi melalui pertumbuhan ini dapat digunakan untuk menganalisis potensi jangka panjang pembangunan ekonomi, khususnya yang menyangkut kesenjangan (trade-off). Sehingga paling tidak ada empat pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat paling miskin: (1) meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan daerah sampai tingkat maksimal dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien, (2) mengalihkan investasi kepada golongan masyarakat miskin dalam bentuk pendidikan, kesehatan, penyediaan kredit dan fasilitas umum, (3) melakukan redistribusi pendapatan kepada golongan masyarakat miskin melalui sistem fiskal, atau mengalokasikan barang-barang konsumsi secara

langsung, dan (4) pengalihan harta yang sudah ada kepada golongan masyarakat miskin, misalnya melalui land reform.

## 2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Regional

Teori yang membicarakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional sebagian dikutip dari teori-teori makro ekonomi pembangunan dengan mengubah batas wilayah dan disesuaikan dengan lingkungan operasionalnya, dan sebagian lagi merupakan teori yang dikembangkan asli untuk ekonomi regional (Arsyad, 1999). Pada kelompok pertama, dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu dalam wilayah operasinya, seperti dalam makroekonomi pembangunan istilah ekspor dan impor adalah perdagangan dengan luar negeri, maka dalam ekonomi regional hal itu berarti perdagangan antar wilayah (termasuk perdagangan dengan luar negeri). Daerah tidak bisa menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, dan pergerakan barang dan jasa antar daerah bersifat lebih terbuka. Termasuk dalam kelompok ini adalah teori ekonomi klasik, teori Harrod-Domar, teori Solow-Swan, dan teori jalur cepat (turnpike).

Kelompok kedua, dimana teori ini dikembangkan asli dalam konteks ekonomi regional, antara lain akan membahas pengklasifikasian pendapatan dari suatu daerah dan faktor-faktor apa yang menunjang peningkatan pendapatan tersebut. Demikian pula teori ini dapat digunakan untuk



menganalisis hubungan antara dua daerah atau lebih dan kaitannya dengan pemerataan pendapatan dan kebijakan yang menunjang pemerataan pendapatan antar daerah. Termasuk dalam kelompok ini adalah teori basis ekspor dan model pertumbuhan interregional.

### 2.1. Teori Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi pertama kali di tulis oleh Adam Smith dalam bukunya yang sangat terkenal *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of The Nations*, tahun 1776. Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasakan baik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa perekonomian pada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi samapi tercapai posisi stasioner (*stationary state*). Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya termanfaatkan. Kalaupun ada pengangguran, hal itu hanyalah bersifat sementara dan pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam memproduksi barang dan jasa. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian, seperti: (1) menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat (2)

membuat peraturan-peraturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi, (3) menyediakan sarana dan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar. Pengusaha perlu mendapatkan keuntungan besar agar dapat mengakumulasi modal dan membuat investasi baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru.

. Setelah terjadi depresi ekonomi dunia tahun 1929 -1932, teori Smith kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes (1936) yang mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) dan pengawasan langsung. Kedua kelompok ini sama-sama mengandalkan mekanisme pasar, hanya perbedaannya terletak pada besar-kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian. Belakangan disadari bahwa pemerintah perlu turun tangan untuk menyediakan jasa yang melayani orang banyak ketika swasta tidak berminat menanganinya apabila tidak diberikan hak-hak khusus.

Dalam kerangka ekonomi regional, ada pandangan Smith yang tidak bisa diterapkan sepenuhnya, misalnya lokasi dari kegiatan ekonomi tersebut. Terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam teori Smith tersebut, pandangannya masih banyak yang layak dan relevan untuk diterapkan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi regional, seperti : memberi kebebasan

kepada setiap orang atau badan untuk berusaha (pada lokasi yang diperkenankan); tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang; tidak membuat tarif pajak daerah yang lebih tinggi dari daerah lain sehingga pengusaha tidak mau berusaha di daerah tersebut; menjaga keamanan dan ketertiban sehingga relatif aman untuk berusaha; menyediakan berbagai fasilitas dan prasarana sehingga pengusaha dapat beroperasi dengan efisien serta tidak membuat prosedur penanaman modal yang rumit. Pada dasarnya pemerintah berusaha menciptakan iklim yang kondusif untuk berusaha dan tidak memberikan hak monopoli (penjual tunggal) atau hak monopsoni (pembeli tunggal) kepada pihak swasta atas dasar lisensi, serta informasi tentang pasar disebarluaskan kepada masyarakat.

3.. Teori Harrod – Domar dalam Sistem Ekonomi Regional  
Teori ini dikembangkan dalam waktu hampir bersamaan oleh Roy F. Harrod pada tahun 1948 di Inggris, dan Evsey D. Domar pada tahun 1957 di Amerika Serikat. Walaupun menggunakan perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek

(kondisi statis) sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis).

Untuk mengembangkan teorinya, Harrod-Domar menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Perekonomian bersifat tertutup
2. Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan.
3. Proses produksi memiliki koefisien tetap (constant return to scale)
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja ( $n$ ) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar asumsi-asumsi di atas, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (suatu kondisi dimana seluruh kenaikan produksi bisa diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :  $g = K = n$ , dimana  $g$  = tingkat pertumbuhan output (growth);  $K$  = tingkat pertumbuhan modal (capital) dan  $n$  = tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Agar terdapat keseimbangan, maka antara tabungan ( $S$ ) dan investasi ( $I$ ) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran  $K$  untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh ratio modal-output (capital output ratio).

Apabila tabungan dan investasi adalah sama ( $S=I$ ), maka :

Agar pertumbuhan mantap, maka harus dipenuhi syarat:  $g=n=s/v$ , dimana :

$I$ = investasi;  $S$  = tabungan;  $K$  = tingkat pertumbuhan modal (capital);  $Y$  = total pendapatan;  $s$  = hasrat menabung (MPS) dan  $v$  = ratio modal-output.

Karena  $s$ ,  $v$  dan  $n$  bersifat independen maka dalam perekonomian tertutup sulit untuk tercapai kondisi pertumbuhan mantap. Sementara Harrod-Domar menggunakan asumsi mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi, dalam kesimpulannya dikatakan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang.

Untuk perekonomian daerah, Richardson (1977) merombak kekakuan di atas dengan menggunakan asumsi bahwa perekonomian daerah bersifat terbuka. Artinya, faktor-faktor produksi atau hasil produksi berlebih dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran-kebocoran dalam menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat membantu menyedot output kapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain yang tercermin dalam surplus ekspor. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang dapat diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto

dapat menyeimbangkan pertumbuhan tenaga kerja ( $n$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $g$ ). Jadi dalam sistem perekonomian terbuka persyaratannya menjadi sedikit longgar.

Syarat perekonomian terbuka, disajikan dalam persamaan matematika sebagai berikut :

, dapat dirumuskan menjadi

, atau

dengan menggunakan asumsi daerah  $i$  dan daerah  $j$ , maka hubungan ekspor dan impor antara dua daerah, dapat digambarkan sebagai berikut :

dimana :

= ekspor daerah  $i$

= impor daerah  $j$  dari daerah  $i$

= marginal propensity to import

= pendapatan daerah  $j$ .

Dengan demikian Richardson merumuskan perekonomian suatu daerah sebagai berikut:

, yang mana rumus ini diturunkan dari

persamaan :

dimana

Berdasarkan rumus di atas, maka suatu daerah akan tumbuh cepat atau

memiliki  $g$  yang tinggi maka persyaratannya adalah daerah tersebut harus memiliki tingkat tabungan ( $s$ ) yang tinggi; impor ( $m$ ) tinggi; ekspor kecil; dan rasio modal-output (capital output ratio = COR) kecil. Yang dapat diekspor dan diimpor adalah barang konsumsi dan barang modal. Dalam model ini, kelebihan atau kekurangan tabungan dan tenaga kerja dapat dinetralisir oleh arus keluar atau arus masuk dari setiap faktor diatas. Pertumbuhan yang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja interregional bersifat menyeimbangkan atau tidak. Pada model ini arus modal dan tenaga kerja searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya secara seimbang. Dalam prakteknya, daerah yang pertumbuhannya tinggi (daerah yang telah maju) akan menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lain yang pertumbuhannya rendah dan hal inilah yang membuat pertumbuhan antar daerah menjadi pincang. Artinya, daerah yang maju akan semakin maju dan yang terbelakang akan semakin ketinggalan. Sehingga pertumbuhan antar daerah mengarah pada heterogenous (makin pincang). Teori Harrod-Domar perlu diperhatikan oleh wilayah yang terbelakang dan terpencil atau hubungan keluaranya sangat sulit. Dalam kondisi seperti ini biasanya barang modal sangat langka sehingga sulit untuk melakukan konversi barang modal dan tenaga kerja. Untuk daerah seperti ini, bagi sektor produksi yang hasil produksinya tidak layak atau kurang

menguntungkan untuk di ekspor (karena biaya angkut tinggi atau produknya tidak tahan lama) maka peningkatan produksi mengakibatkan produk tidak terserap oleh pasar lokal dan tingkat harga akan turun drastis sehingga akan merugikan produsen. Oleh karena itu, lebih baik mengatur pertumbuhan berbagai sektor secara seimbang sehingga pertambahan produksi di satu sektor dapat diserap oleh sektor lain yang tumbuh secara seimbang.

### 2.3. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T.W. Swan dari Australia (1956). Teori mereka disebut juga dengan istilah teori neoklasik. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah masuknya unsur kemajuan teknologi dalam model Solow-Swan ini. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan menurut mereka berasal dari tiga sumber yaitu : akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solow-Swan, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu.



Teori Solow-Swan menilai bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mempengaruhi atau mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Model Solow-Swan secara matematika dapat disajikan sebagai berikut :

dalam kerangka ekonomi regional, Richardson (dalam Sihotang, 1977) menderivasikan rumus di atas menjadi sebagai berikut :

dimana :

= besarnya output

= tingkat pertumbuhan modal

= tingkat pertumbuhan tenaga kerja

= kemajuan teknologi

= bagian yang dihasilkan dari faktor modal

= bagian yang dihasilkan oleh faktor di luar modal.

Agar faktor produksi selalu berada pada kapasitas penuh (full employment) perlu mekanisme yang menyamakan investasi (I) dengan tabungan (S). Dengan demikian pertumbuhan mantap (steady growth) membutuhkan syarat :

dimana  $p$  = marginal productivity of capital. Jika  $p$  sudah tertentu, dan  $a$  tetap konstan maka  $Y$  (pertumbuhan pendapatan) dan  $K$  (pertumbuhan modal)

harus tumbuh dengan tingkat yang sama. Syarat keseimbangan bagi keseluruhan sistem adalah

Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar persaingan sempurna MPL (marginal productivity of labor) adalah merupakan fungsi langsung tetapi memiliki hubungan terbalik dengan MPK (marginal productivity of capital). Hal ini bisa dilihat dari rasio modal dan tenaga kerja (K/L).

Teori Neoklasik sebagai penerus teori Klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna perekonomian bisa tumbuh optimal. Sama halnya dengan model ekonomi klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan berbagai hambatan dalam perdagangan, perpindahan orang, barang dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja dan perlunya perluasan informasi pasar. Sarana dan prasarana perhubungan dibangun dengan baik, dan terjaminnya keamanan, ketertiban dan kestabilan politik. Model Neoklasik sangat memperhatikan kemajuan teknologi yang dapat ditempuh melalui peningkatan sumberdaya manusia. Peranan kemajuan teknologi dan inovasi sangat besar dalam memacu pertumbuhan wilayah.

#### 2.4. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat

Teori pertumbuhan jalur cepat (turnpike) diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955. Setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Artinya, dengan dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa diekspor (keluar daerah atau luar negeri). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat. Selain itu perlu diperhatikan pandangan beberapa ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) dalam masyarakat. Jiwa kewirausahaan berarti pemilik modal mampu melihat peluang usaha dan berani mengambil

resiko membuka usaha baru ataupun memperluas usaha yang telah ada sebelumnya. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha akan menyediakan lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang selalu bertambah setiap tahunnya. Angkatan kerja yang tidak tertampung dapat menyebabkan terjadinya instabilitas keamanan sehingga investor tidak tertarik menanam investasi dan mengakibatkan stagnasi perekonomian, demikian seterusnya ekonomi yang stagnan tidak mampu menampung angkatan kerja baru sehingga instabilitas keamanan makin buruk. Apabila jaminan keamanan dalam berusaha sudah tidak ada, maka investor yang sudah adapun akan merelokasi usahanya dan bila hal ini terjadi akan mengakibatkan depresi ekonomi pada suatu daerah, dan akan menurunkan tingkat kemakmuran daerah.

## 2.5. Teori Basis Ekspor Richardson

Teori basis ekspor untuk pertama kali dikenalkan oleh Tiebout, murni dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi regional. Teori membagi sektor produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service (pelayanan) atau lebih sering disebut sektor nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian daerah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan pekerjaan service

(nonbasis) adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung dari kondisi umum perekonomian daerah tersebut (endogenous). Perbedaan pandangan antara Richardson dan Tiebout dalam teori basis adalah Tiebout melihatnya dari sisi produksi sedangkan Richardson melihatnya dari sisi pengeluaran. Walaupun teori basis ekspor (export base theory) adalah yang paling sederhana dalam membicarakan unsur-unsur pendapatan daerah, tetapi dapat memberikan kerangka teoritis bagi banyak studi empiris tentang multiplier regional. Teori ini memberikan landasan yang kuat bagi studi pendapatan regional walaupun dalam kenyataannya perlu dilengkapi dengan kebijakan lain agar bisa digunakan sebagai pengatur pembangunan wilayah yang komprehensif. Pada mulanya teori basis ekspor hanya memasukkan ekspor murni ke dalam pengertian ekspor. Akan tetapi, orang membuat definisi ekspor yang lebih luas. Pengertian ekspor tidak hanya menyangkut barang dan jasa yang dijual ke luar daerah (atau luar negeri) tetapi termasuk juga didalamnya barang atau jasa yang dibeli orang dari luar daerah walaupun transaksi itu terjadi di daerah tersebut. Kegiatan lokal yang melayani pariwisata adalah pekerjaan basis karena mendatangkan uang dari luar daerah. Demikian pula kegiatan lokal di perkotaan seperti restoran, bengkel, usaha grosir dan swalayan yang melayani orang dari luar daerah adalah pekerjaan basis. Jadi pada intinya, kegiatan yang hasilnya dijual ke

luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah adalah kegiatan basis. Sedangkan kegiatan service (nonbasis) adalah kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun asal uangnya dari daerah itu sendiri.

Teori basis ekspor menggunakan dua asumsi, yaitu : (1) asumsi pokok atau yang utama bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen (independen) dalam pengeluaran. Artinya, semua unsur pengeluaran lain terikat (dependen) terhadap pendapatan. Secara tidak langsung hal ini berarti diluar pertambahan alamiah , hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor-sektor lain terikat peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat. Jadi satu-satunya yang bisa meningkat secara bebas adalah ekspor. Ekspor tidak terikat dalam siklus pendapatan daerah; (2) asumsi kedua adalah fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan.

Selanjutnya menurut Richardson (1977) memberikan uraian secara matematika sebagai berikut

:1. Menurut Richardson besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah maka ekspornya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan, demikian pula impornya. Hal

ini membuat daerah yang besar cenderung memiliki multiplier basis ( $K$ ) yang tinggi karena ratio pendapatan ekspor adalah rendah, tetapi karena  $m$  juga rendah dan ini cenderung menaikkan  $K$ . Sebaliknya, pada daerah yang kecil maka rasio pendapatan ekspor adalah tinggi, tetapi  $m$  juga tinggi dan ini cenderung menurunkan  $K$ . Jadi  $K$  bisa berubah bila luas daerah analisis bisa diubah. Dengan demikian sulit dijadikan pegangan tunggal dalam peramalan apabila luas daerah berubah dari satu waktu ke waktu berikutnya.

3. Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti : pengeluaran atau bantuan pemerintah pusat, investasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. Dalam melakukan studi atas satu wilayah, multiplier basis yang diperoleh adalah rata-ratanya dan bukan perubahannya. Menggunakan multiplier basis rata-rata untuk proyeksi seringkali memberikan hasil yang keliru apabila ada tendensi perubahan nilai multiplier dari tahun ke tahun.
4. Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan sebagai alat proyeksi maka masalah time lag (masa tenggang) harus diperhatikan. Masa tenggang berarti penggandaan tidak berlangsung secara cepat , yaitu dibutuhkan waktu antara terjadinya kenaikan ekspor(sektor basis) dengan respons sektor nonbasis. Ada pakar yang mengatakan bahwa

hal ini dapat diatasi dengan menghitung pengganda basis dengan menggunakan data time series selama tiga sampai lima tahun.\

5. 5. Ada kasus dimana suatu daerah yang tetap berkembang pesat meski ekspornya relatif kecil. Pada umumnya hal ini dapat terjadi pada daerah yang terdapat banyak ragam kegiatan dan satu kegiatan saling membutuhkan dari produk kegiatan lainnya. Pada daerah ini tetap tercipta pasar yang tertutup tetapi dinamis, dan ini bisa terjadi apabila syarat-syarat keseimbangan yang dituntut dalam teori Harrod-Domar dapat dipenuhi. Dalam model pertumbuhan interregional ini, sumber-sumber perubahan pendapatan regional dapat berasal dari :

1. Perubahan pengeluaran otonom regional, seperti : investasi dan pengeluaran pemerintah.
2. Perubahan pendapatan suatu daerah atau beberapa daerah lain yang berada dalam suatu sistem yang akan terlihat dari perubahan ekspor.
3. Perubahan salah satu di antara parameter-parameter model (hasrat konsumsi marginal, koefisien perdagangan interregional, atau tingkat pajak marjinal).

Menurut Cann, multiplier regional sebagaimana disajikan dalam rumus di



atas sangat Teori Pusat Pertumbuhan ( Growth Pole Theory )  
Dalam analisis ekonomi regional, secara implisit seringkali diasumsikan bahwa daerah atau region yang dianalisis adalah homogen. Padahal secara faktual terdapat perbedaan yang menciptakan suatu hubungan unik antara suatu bagian dengan bagian lainnya dalam wilayah tersebut. Dalam suatu wilayah, ada penduduk atau kegiatan yang terkonsentrasi pada suatu tempat, yang disebut dengan berbagai istilah seperti: kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat permukiman, atau daerah modal. Sebaliknya, daerah di luar pusat konsentrasi dinamakan: daerah pedalaman, wilayah belakang (hinterland), daerah pertanian, atau daerah pedesaan (Tarigan, 2004).

Keuntungan bertempat di daerah terkonsentrasi adalah terciptanya skala ekonomis (economies of scale) dan economies of agglomeration (economies of localization). Dikatakan economies of scale, karena dalam berproduksi sudah berdasarkan spesialisasi, sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unitnya menjadi lebih efisien. Dengan melakukan spesialisasi, dapat dibeli mesin dengan kapasitas yang lebih besar sehingga biaya per unit kapasitasnya menjadi lebih murah. Dasar dari economies of scale adalah faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi (indivisibility), termasuk tenaga buruh dan pimpinan.

Economies of agglomeration adalah keuntungan karena ditempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan, seperti: jasa perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat-tempat pelatihan keterampilan, media untuk mengiklankan produk, dan lain sebagainya. Ditempat ini juga mudah diperoleh tenaga kerja terampil (tanpa melatih terlebih dahulu). Sebagai pusat perdagangan, akan mudah memperoleh bahan baku ataupun tempat untuk menjual hasil produksi. Tarigan, 2004, menjelaskan pula hubungan yang terjadi antara daerah yang lebih maju ( sebut saja dengan istilah kota) dengan daerah lain yang lebih terbelakang, sebagai berikut :

1. Generatif : yaitu hubungan yang saling menguntungkan atau saling mengembangkan antara antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang ada di belakangnya. Daerah kota dapat menyerap tenaga kerja atau memasarkan produksi dari daerah pedalaman (daerah yang lebih terbelakang). Sementara itu, daerah pedalaman berfungsi sebagai tempat untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh industri perkotaan, dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Selain itu, kota merupakan tempat inovasi dan modernisasi yang dapat

diserap oleh daerah pedalaman. Adanya pertukaran dan saling ketergantungan ini, akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan sejajar antara daerah kota dengan daerah yang ada dibelakangnya.

2. Parasitif : yaitu hubungan yang terjadi dimana daerah kota (daerah yang lebih maju) tidak banyak membantu atau menolong daerah belakangnya, dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh didaerah belakangnya. Kota parasitif umumnya adalah kota yang belum banyak berkembang industrinya dan masih memiliki sifat daerah pertanian tetapi juga perkotaan sekaligus.

3. Enclave (tertutup): dimana daerah kota (daerah yang lebih maju) seakan-akan terpisah sama sekali dengan daerah sekitarnya yang lebih terbelakang. Buruknya prasarana, perbedaan taraf hidup dan pendidikan yang mencolok, dan faktor-faktor lainnya dapat menyebabkan kurangnya hubungan antar kedua daerah di atas. Untuk menghindari hal ini, daerah-daerah terbelakang perlu didorong pertumbuhannya, sedangkan daerah yang lebih maju dapat berkembang atas kemampuannya sendiri.

Selanjutnya, pusat pertumbuhan (growth pole) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (daerah yang ada di belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut. Masyarakat merasa senang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut. Tidak semua kota generatif dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri (Tarigan, 2004), yaitu:

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota.

Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Pertumbuhan tidak terlihat pincang, ada sektor yang tumbuh cepat tetapi ada sektor lainnya yang tidak terkena imbas sama sekali. Berbeda halnya dengan sebuah kota yang fungsinya hanya sebagai perantara (transit). Disebut sebagai kota perantara karena kota itu hanya berfungsi mengumpulkan berbagai macam berbagai komoditi dari daerah di belakangnya dan menjual ke kota lain yang lebih besar, selanjutnya membeli berbagai macam kebutuhan masyarakat dari kota lain untuk didistribusikan ke daerah yang ada di belakangnya. Pada daerah perantara tidak terdapat banyak pengolahan ataupun kegiatan yang menciptakan nilai tambah, kecuali kegiatan-kegiatan pensortiran dan pembungkusan, dan tidak melakukan perubahan bentuk dan kegunaan dari barang.

## 2. Ada efek pengganda (multiplier effect)

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada

satu sektor di suatu wilayah mengalami kenaikan permintaan yang berasal dari luar wilayah, maka produksi sektor tersebut akan meningkat. Karena ada keterkaitan dengan sektor-sektor lain, maka produksi sektor-sektor lainnya juga meningkat dan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan, sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan awal yang berasal dari luar wilayah tersebut. Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu memacu pertumbuhan daerah dibelakangnya. Karena terjadi peningkatan produksi berbagai sektor di daerah yang lebih maju, akan memacu dan meningkatkan permintaan bahan baku dari daerah-daerah yang ada di belakangnya.

### 3. Adanya konsentrasi geografis

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari wilayah yang lebih maju tersebut. Orang yang datang ke wilayah tersebut dapat bisa memperoleh berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Dengan demikian dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Hal inilah yang menjadi

daya tarik wilayah maju untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang semakin meningkat akan menciptakan economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan.

5. Bersifat mendorong pertumbuhan daerah di belakangnya  
Hal ini berarti antara wilayah yang lebih maju dengan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Daerah yang lebih maju membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan selanjutnya menyediakan berbagai macam kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila wilayah yang lebih maju memiliki hubungan yang harmonis dengan daerah belakangnya dan juga memiliki ketiga karakteristik di atas, maka wilayah tersebut akan berfungsi mendorong daerah belakangnya.

### 3.3. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Regional

Dalam model pertumbuhan interregional, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-2 terdahulu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam analisis I-O interregional, ada tiga hal utama yang berpengaruh yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu: (1) investasi, (2) pengeluaran pemerintah, dan (3) perdagangan antar daerah (ekspor-impor daerah).

### 3.1. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Investasi adalah salah satu hal penting dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan atau injeksi investasi tidak hanya meningkatkan permintaan agregat seperti dalam model ekonomi makro Keynes, tetapi juga meningkatkan penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam persepektif waktu yang lebih panjang, maka investasi akan meningkatkan stok kapital, dan setiap penambahan stok kapital akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Soediyono (1992) meski berbicara pada level negara (nasional), tetapi masih relevan untuk diterapkan di tingkat regional. Dikatakan bahwa masyarakat yang perekonomiannya tumbuh dan berkembang disebabkan oleh karena investasi nettonya bernilai positif (investasi bruto lebih besar dari pada penyusutan). Apabila pemerintah menginginkan untuk menaikkan taraf hidup masyarakatnya, maka kapasitas produksi daerah perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk memperbesar kapasitas produksi perlu peningkatan



stok kapital. Agar supaya stok kapital meningkat, maka diperlukan investasi yang besar.

Tarigan (2004) menggambarkan bahwa injeksi investasi di suatu daerah tidak hanya berpengaruh pada ekspor daerah tersebut, tetapi juga meningkatkan ekspor daerah-daerah lain. Dengan menggunakan asumsi tiga daerah, yaitu I, J dan K, maka pengaruh injeksi investasi seperti digambarkan pada Gambar 2.

Dengan menggunakan Model Pertumbuhan Interregional, maka diperoleh persamaan pendapatan regional sebagai berikut :

karena , maka persamaan di atas menjadi :

maka persamaan di atas diartikan bahwa: pendapatan daerah-i ( $Y_i$ ) terdiri dari penjumlahan pengeluaran otonom ditambah dengan ekspor dikalikan dengan multiplier regional.

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat kita lihat bahwa investasi (I) pada suatu daerah akan berpengaruh langsung dan bernilai positif terhadap pendapatan daerah (Y) tersebut. Artinya, apabila investasi di suatu daerah bertambah besar, maka secara teoritis akan meningkatkan pendapatan daerahnya. Besarnya dampak perubahan pendapatan daerah akibat perubahan investasi ( ) tergantung pada

angka pengganda (multiplier) regional. Angka pengganda regional (Kdari persamaan di atas, adalah :

$$dY/dI =$$

dimana :

$k$  = multiplier regional

$c$  = marginal propensity to consume

$m$  = marginal propensity to import

### 3.2.. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Berdasarkan pada teori makro ekonomi, maka pengeluaran pemerintah (government expenditure) untuk pembelian barang dan jasa merupakan injeksi terhadap perekonomian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan oleh sejauhmana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak (fiscal policy). Pengeluaran pemerintah biasanya ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan. Walaupun pengeluaran pemerintah berupa injeksi terhadap perekonomian, namun data empiris dapat menunjukkan dampak sebaliknya yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah yang menggantikan sebagian aktivitas investasi swasta biasanya di kelola dengan tidak efisien.

Beberapa hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh beberapa peneliti untuk melihat dampak injeksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, disajikan dalam Setia Hadi (2001) sebagai berikut

- :1. Penelitian yang dilakukan oleh Landau di 104 negara dengan melihat hubungan regresi antara PDB per kapita dengan pengeluaran pemerintah terhadap fasilitas pendidikan, menunjukkan koefisien negatif. Ini berarti semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
2. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh tertinggi di banding investasi kapital dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi Ram pada 94 negara sedang berkembang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki koefisien 1.25 dan lebih tinggi dari koefisien tenaga kerja 0.45 dan kapital sebesar 0.13. Studi yang sama terhadap data time series satu negara, menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda. Selanjutnya dikatakan bahwa ekonomi Indonesia yang termasuk dalam studi Ram ini menunjukkan bahwa untuk setiap 1 persen peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan PDB cukup besar yaitu 0.62 persen.

Bila pengertian pertumbuhan ekonomi menggunakan konsep yang menyangkut proses pertumbuhan seluruh masyarakat, maka setiap pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk penyediaan infrastruktur publik selalu berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi. Apalagi hal ini dilaksanakan untuk mendorong wilayah

atau propinsi terkebelakan tetapi memiliki potensi sumberdaya alam besar, tetapi menghadapi masalah kelangkaan ketersediaan infrastruktur publik. Selanjutnya, bila mengacu kepada persamaan model Pembangunan Ekonomi Interregional sebagaimana yang telah disampaikan di atas, maka :

pengeluaran pemerintah daerah (G) akan berpengaruh langsung pada pendapatan daerah. Besarnya dampak pengeluaran pemerintah tergantung pada angka pengganda :

$$dY/dG =$$

3.3. Perdagangan Interregional dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Dalam pengertian ekonomi internasional yang dipelajari adalah alokasi sumberdaya langka untuk memenuhi kebutuhan manusia, dari suatu negara ke negara lain. Dalam kerangka ekonomi regional lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Sehingga pengertian ekspor dalam ekonomi regional adalah transaksi perdagangan yang terjadi antara pelaku di satu wilayah dengan pelaku yang ada di wilayah lain. Tetapi pengertian ekspor juga berlaku apabila transaksi perdagangan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan luar negeri.

Menurut Nopirin (1995), perbedaan antara ekonomi internasional dan ekonomi

regional adalah karena ekonomi internasional menyangkut hubungan internasional beberapa negara dimana:

1. Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar (immobilitas faktor produksi).
2. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan serta politik juga berbeda.
3. Faktor-faktor produksi yang dimiliki (faktor endowment) berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Terlepas apakah perdagangan yang terjadi antar wilayah tersebut, menyangkut hubungan antar negara ataupun antar wilayah dalam satu negara, maka pada prinsipnya secara teoritis perdagangan antar wilayah dapat saling menguntungkan satu sama lain. Dengan menggunakan asumsi dua wilayah A dan B; dan hanya satu barang yang diperdagangkan; dapat dilakukan analisis secara parsial untuk melihat terjadinya perdagangan antar wilayah. Analisis parsial perdagangan antar wilayah dapat dilihat pada Gambar
3. dapat dilihat pada Gambar
4. Karena harga keseimbangan yang terjadi di wilayah A berbeda (lebih rendah) dengan harga keseimbangan di daerah B maka perbedaan ini membuka peluang untuk terjadinya perdagangan antar wilayah (interregional). Barang akan mengalir (diekspor) dari wilayah A ke wilayah B. Harga barang di

wilayah A akan naik karena karena jumlahnya berkurang, sementara harga barang di wilayah B akan turun karena jumlahnya bertambah banyak. Demikian seterusnya sampai pada satu titik dimana harga barang pada kedua wilayah adalah sama.

Selanjutnya, dalam teori basis ekspor (base export theory) yang menganggap ekspor satu-satunya kegiatan untuk mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan baru. Jadi pertumbuhan ekonomi regional sangat tergantung kepada aktivitas ekspor. Dengan menggunakan persamaan persamaan (6) pada bab-2, diperoleh bahwa pendapatan regional merupakan kelipatan dari ekspor, dengan rumus :

5. dimana :  $Y_i$  adalah pendapatan regional,  $e_i$  adalah marginal propensity to expenditure, dan  $m_i$  adalah marginal propensity to import. Dari persamaan di atas, maka diperoleh angka pengganda basis ekspor (multiplier) sebagai berikut :
- $$\frac{dY_i}{dX_i} =$$

Sedangkan dalam model pertumbuhan interregional, yang merupakan perluasan dari teori basis, menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi regional terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh aktivitas ekspor tetapi juga disebabkan oleh variabel lainnya seperti: (1) investasi dan pengeluaran pemerintah, (2) pertumbuhan daerah lain yang berada dalam satu sistem, dan

(3) perubahan dalam hasrat konsumsi marginal, koefisien perdagangan interregional, dan tingkat pajak marginal. Kesimpulan dari model pertumbuhan interregional disajikan dalam persamaan matematika sebagai berikut :

dimana  $Y_i$  adalah pendapatan regional daerah-i,  $A$  adalah pengeluaran otonom total, yang terdiri dari pengeluaran untuk investasi dan belanja pemerintah,  $X_i$  adalah ekspor daerah-i, dan  $K$  adalah angka pengganda regional yang besarnya adalah :

6. dimana  $\alpha =$  marginal propensity to consume,  $\beta =$  marginal propensity to import, dan  $\tau =$  tingkat pajak marginal

## **Bab IV**

### **Pertumbuhan ekonomi Daerah**

#### **Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2019 mencapai 5,5% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,6% (yoy), sejalan dengan kembali normalnya pola konsumsi pasca momentum akhir tahun 2018. Dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa, kinerja perekonomian Jawa Timur pada periode ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

Dari sisi permintaan, tertahannya laju pertumbuhan dikontribusi oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, serta net ekspor antar daerah. Sementara dari sisi penawaran, tertahannya laju kinerja industri pengolahan dan konstruksi serta kontraksi lapangan usaha pertanian menjadi penyebab perlambatan kinerja perekonomian Jawa Timur.

Namun demikian perlambatan lebih dalam tertahan oleh peningkatan ekspor luar negeri yang disertai kontraksi impor luar negeri, sejalan dengan kinerja positif sektor perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum.



### **Asesmen Inflasi Daerah**

Inflasi Jawa Timur pada triwulan I 2019 mencapai 2,35% (yoy) melambat dibandingkan triwulan IV 2018 (2,86%) seiring dengan kembali normalnya konsumsi pasca momentum akhir tahun dan perlambatan inflasi bahan makanan seiring panen hortikultura dan penurunan laju inflasi beras dan daging ayam ras.

Penurunan inflasi Jawa Timur terjadi pada seluruh kelompok disagregasi, antara lain penurunan harga bahan bangunan dan apresiasi Rupiah sejak awal tahun (inti), deflasi harga beras dan komoditas bumbu-bumbuan serta penurunan laju inflasi daging ayam (*volatile food*), dan penyesuaian kebijakan penurunan Tarif Dasar Listrik (*administered prices*). Sementara itu berdasarkan kelompok barang dan jasa, perlambatan tekanan inflasi disebabkan oleh kelompok bahan makanan yang didorong oleh panen komoditas hortikultura.

Inflasi Jawa Timur pada triwulan II 2019 diperkirakan berada pada sasaran inflasi 3,5+1% namun meningkat dibanding capaian inflasi triwulan I 2019 seiring dengan penyelenggaraan Pemilu dan peningkatan konsumsi seiring momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

### **Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah**

APBD Kabupaten/Kota masih menjadi kontributor terbesar anggaran Pemerintah di Jawa Timur, sementara APBN Provinsi di Jawa Timur membukukan realisasi tertinggi. Anggaran pengeluaran pemerintah di Jawa Timur tahun 2019 sebelum perubahan turun 0,24% (yoy) dibandingkan tahun 2018 (Rp191,17 triliun). Berdasarkan nominal dan pangsa, APBD Kabupaten/Kota mendominasi anggaran pengeluaran pemerintah di Jawa Timur (Rp98,57 triliun, pangsa 51,68%), diikuti dengan APBN untuk Jawa Timur (Rp58,63 triliun, pangsa 30,74%), dan terendah adalah APBD Provinsi Jawa Timur (Rp33,52 triliun, pangsa 17,58%).

Pada triwulan I 2019, total realisasi pengeluaran pemerintah mencapai 12,72% dari pagu anggaran sedikit lebih baik dibandingkan triwulan I 2018 (11,33%). Realisasi tertinggi terjadi pada APBN (19,01% dari pagu anggaran), disusul oleh APBD Provinsi Jawa Timur (11,76%) dan terendah adalah APBD Kabupaten/Kota yang hanya sebesar 9,30% dari pagu anggaran.

### **Asesmen Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM**

Stabilitas sistem keuangan Jawa Timur triwulan I 2019 masih terjaga. Kinerja sektor korporasi dan sektor rumah tangga relatif stabil. Stabilitasnya kinerja korporasi tercermin dari rasio keuangan korporasi yang terjaga, masih tingginya pertumbuhan lapangan usaha industri dalam struktur PDRB Jawa Timur (7,3%), meningkatnya pertumbuhan ekspor luar negeri (1,6%), serta meningkatnya eksposur kredit korporasi di perbankan (tumbuh 12,64%).

Kinerja sektor rumah tangga (RT) juga masih stabil, meskipun terdapat pengurangan alokasi konsumsi. Masih baiknya kinerja sektor RT tercermin dari masih tingginya pertumbuhan konsumsi RT (4,9%), masih tingginya alokasi konsumsi dalam pengeluaran RT (67,32%) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Berkurangnya alokasi konsumsi bukan disebabkan oleh penurunan penghasilan, melainkan karena peningkatan alokasi tabungan untuk berjaga-jaga. Eksposur kredit RT dalam perbankan melambat, dipicu perlambatan KPA, KKB dan kredit multiguna.

Fungsi intermediasi perbankan di Jawa Timur juga masih terjaga, meskipun sedikit melambat pada triwulan I 2019. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2019 mencapai 101,46%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 101,93%.

Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sedikit melambat dibandingkan triwulan IV 2018, seiring dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi dan permintaan konsumsi masyarakat pasca perayaan Natal dan Tahun Baru 2018.

### **Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran**

Pada triwulan I 2019, pergerakan *inflow* (uang masuk) dan *outflow* (uang keluar) di Jawa Timur dalam posisi *net inflow* sebesar Rp11,74 triliun, meningkat 48,11% dibanding triwulan IV 2018. Hal ini sejalan dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca peningkatan konsumsi pada momen Natal 2018 dan tahun baru 2019.

Transaksi non tunai melalui Kliring dan RTGS di wilayah Jawa Timur mengalami perlambatan sejalan dengan melambatnya kinerja industri serta konsumsi swasta sehingga secara tidak langsung juga mengurangi transaksi non tunai.

Transaksi penukaran mata uang asing melalui KUPVA BB yang berkantor pusat di Jawa Timur masih didominasi oleh mata uang USD (25,31%) dan SGD (18,85%). Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Jawa Timur, sedangkan Singapura merupakan salah satu investor utama di Jawa Timur.

Transaksi melalui Agen LKD meningkat tajam pada triwulan I 2019 melanjutkan peningkatan yang mulai terjadi pada triwulan IV 2018. Pada triwulan I 2019, jumlah agen LKD di Jawa Timur sebesar 53.959 agen, naik 7,31% dibanding triwulan IV 2018 yang mencapai 50,284 agen. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya keuangan inklusif di Jawa Timur.

### **Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Triwulan I 2019 lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, tercermin dari membaiknya indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat serta menurunnya angka kemiskinan.

Dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan jumlah angkatan kerja diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (dari 3,99% menjadi 3,83%). Dari sisi kesejahteraan, terdapat peningkatan kesejahteraan nelayan, sedangkan kesejahteraan petani cenderung menurun.

### **Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2019**

Prospek pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Jatim di 2019 diperkirakan stabil. Dengan kondisi dan prospek ekonom global dan domestik saat ini, ekonomi Jatim sepanjang tahun 2019 diperkirakan tumbuh di rentang 5,3% - 5,7% (yoy), stabil dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, inflasi di kisaran 2,8% - 3,2% cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun masih dalam sasaran inflasi 3,5+1% (yoy).

## soal

### EKONOMI REGIONAL

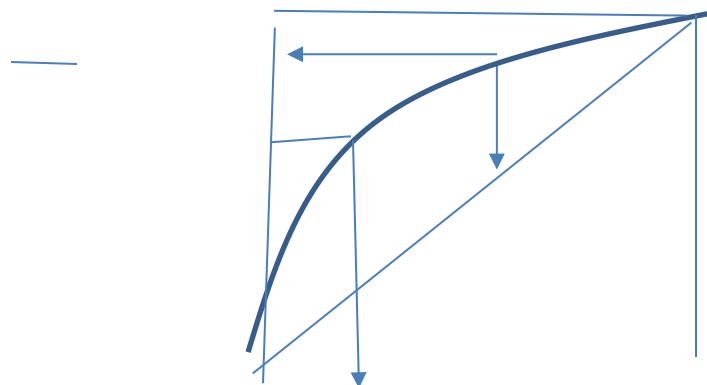
*Pendapatan Regional* suatu masyarakat suatu daerah (Kab/Kota, Propinsi) disebut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) seperti, PDB sector-sektornya sama 17 sektor; sector: Pertanian, Pertambangan, Industri dst

Untuk mengukur pendapatan perkapita adalah PDRB : Jumlah Penduduk, Pertumbuhan ekonomi Pertahun adalah kenaikan PDRB dari tahun ketahun,

PDRB juga ada dua catatan PDRB harga Berlaku dan PDRB harga Konstan, karga berlaku inflasi juga masih di hitung, tetapi PDRB harga Konstan INFLASI TIDAK DI HITUNG

Pemerataan Pendapatan dihiung denan GINI rasio

Makin cembung makin tidak merata makin mendekayigaris tsb makin merata pembagian pendapatannya.



## **Bab V**

### **Permasalahan Ekonomi regional**

#### **Permasalahan Pokok Ilmu Ekonomi Regional –**

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai permasalahan sendiri yang selanjutnya akan dipecahkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Case and Fair (2003) ilmu ekonomi yang tradisional mempunyai 3 pernyataan pokok yang mendasar dan perlu dijawab yaitu :

#### 1. WHAT

Permasalahan pertama adalah menyangkut dengan apa (what) yang akan diproduksi. Dari sini muncul permasalahan produksi yang merupakan salah satu bagian penting dalam ilmu ekonomi.

#### 2. HOW

Permasalahan kedua adalah menyangkut dengan pernyataan bagaimana (how) barang tersebut diproduksi. Pertanyaan ini menimbulkan masalah penggunaan dan mendorong kegiatan produksi. Termasuk dalam pertanyaan ini adalah teknologi produksi bagaimana sebaiknya digunakan, apakah padat karya (*Labor Intensive*) atau padat modal (*Capital Intensive*).

#### 3. WHO

Pertanyaan ketiga adalah siapa (who) yang akan menggunakan hasil produksi tersebut yang menyangkut dengan aspek alokasi dan pemasaran hasil produksi.

Selanjutnya ilmu Ekonomi yang lebih modern mencoba pula menjawab pertanyaan tambahan lainnya :

- Kapan (When) Sebaiknya barang tersebut di produksi. Hal ini mendorong pula munculnya analisa ekonomi yang bersifat dinamis.
- Namun demikian, pertanyaan yang sangat realistis tetapi belum dapat dijawab oleh Ilmu Ekonomi tersebut adalah dimana (Where) kegiatan itu harus dilakukan dan untuk memenuhi permintaan dimana? Pertanyaan ini sangat penting artinya Karena kondisi geografis dan tingkat upah buruh pada umumnya sangat bervariasi antara wilayah sehingga pemilihan alokasi juga menentukan tingkat efisiensi kegiatan produksi dan distribusi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, para ahli ***Ekonomi Regional*** mencoba memuaskan unsure lokasi dan tata ruang ke dalam analisa ekonomi. Hal ini selanjutnya mendorong timbulnya analisa Ekonomi Regional yang memfokuskan pembahasannya pada pengaruh lokasi dan tata ruang dalam pengambilan keputusan bidang ekonomi dan bisnis.

Setelah membahas permasalahan ekonomi regional yang mana di dalamnya juga menjelaskan adanya ruang dalam analisa ekonomi, dan kita juga harus mengetahui peranan – peranan apa yang harus dipenuhi oleh ruang dalam analisa. Naaaah.. kita akan dapat informasi di bawah ini.

### **Peranan Ruang dalam Analisa Ekonomi**

Tidak dapat disangka bahwa adanya ruang (space) adalah merupakan kondisi yang nyata dan berlaku disemua Negara. Lebih labih lagi pada Negara yang mempunyai luas daerah cukup luas dan sangat bervariasi geografinya, aspek ruang menjadi sangat penting sekali dalam analisa ekonomi. Pada Negara yang demikian, pengambilan keputusan ekonomi perlu

mempertimbangkan keuntungan lokasi dan pengaruh ruang ini secara eksplisit agar keputusan yang diambil realistis dan tidak salah. Hal ini tidak hanya berlaku pada *Analisa Ekonomi* Mikro. Aspek ruang muncul dalam Analisa *Ekonomi Regional* dalam berbagai bentuk. Dalam analisa yang bersifat mikro, unsure ruang muncul dalam bentuk analisa lokasi perusahaan (unit produksi), luas areal pasar, kompetisi antar tempat (Spatial Competition) dan penentuan harga antar tempat (Spatial Pricing). Sedangkan dalam analisa yang bersifat makro, unsure ruang ditampilkan dalam bentuk Analisa Konsentrasi Industri, Mobilitas Investasi, dan Faktor Produksi Antar Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Regional (Regional Growth), Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah (Regional Disparity) dan Analisa Pusat Pertumbuhan (Growth Poles). Walaupun untuk aspek tertentu sebenarnya wilayah juga dianalisa dalam Ilmu Ekonomi, tetapi kerangka analisa maupun kesimpulan yang dihasilkan adalah sangat berbeda. Karena itulah, dewasa ini Ilmu Ekonomi Regional telah dapat dianggap sebagai ilmu tersendiri dan merupakan cabang dari ilmu ekonomi secara keseluruhan.

Untuk dapat menghasilkan *Analisa Ekonomi Regional* yang kongkrit dan terukur, unsure ruang dapat ditampilkan dalam variable ongkos angkut yang sangat dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh. Sedangkan jarak dianalisa umumnya dari lokasi bahan baku ke lokasi pabrik dan selanjutnya ke pasar, maupun dari daerah pemukiman ke pasar atau tempat kerja. Ongkos angkut tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi maupun harga jual hasil produksi di pasar. Karena itu, variable ongkos angkut akan mempengaruhi penentuan produksi optimal (producer Equilibrium) maupun daya saing produk di pasar (Spatial Competition).

Variabel selanjutnya yang juga dapat mewakili unsure ruang dalam Analisa *Ekonomi Regional* adalah perbedaan struktur dan potensi social-ekonomi antar wilayah. Perbedaan karakteristik wilayah ini merupakan hal yang bersifat lumrah (natural) dan terjadi diseluruh Negara, baik yang

sudah maju maupun sedang berkembang. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumberdaya alam, tingkat kesuburan tanah maupun kondisi social budaya adalah struktur demografi dan tingkah laku masyarakat yang umumnya sangat bervariasi antar wilayah. Perbedaan struktur dan potensi wilayah ini sangat mempengaruhi analisa pertumbuhan ekonomi regional, analisa ketimpangan ekonomi antar wilayah dan analisa Pusat Pertumbuhan. Selanjutnya variable ini tentunya juga akan sangat mempengaruhi formulasi kebijaksanaan pembangunan dan perensanaan wilayah.

Variable lain yang juga sangat penting artinya dalam analisa *Ekonomi Regional* adalah Interaksi Sosial-ekonomi Antar Wilayah (*Spatial Interaction*). Interaksi antar wilayah ini dapat terjadi dalam 4 bentuk yaitu:

- a. Perdagangan antar daerah
- b. Perpindahan tenaga kerja atau migrasi
- c. Lalu lintas modal dan
- d. Distribusi inovasi antar wilayah (*Spatial Distribution of Innovation*).

Ketiga unsure pertama dapat diukur dengan menggunakan data yang tersedia, sedangkan unsure keempat memerlukan teknik pengukuran tersendiri dengan menggunakan metode statistic tertentu. Variable interaksi social-ekonomi antar wilayah ini juga sangat penting artinya dalam analisa pertumbuhan *ekonomi regional* serta formulasi kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan wilayah sebagai mana sudah disinggung di atas.

\



## BAB VI

### CONTOH KERJASAMA REGIONAL

#### **Pengertian Kerjasama Regional**

Kerjasama antar negara salah satunya dibedakan berdasarkan wilayah negara tersebut berasal dan salah satu jenisnya adalah kerjasama regional. Mengenai kerjasama regional telah kita ketahui sebelumnya pada pengertian bentuk kerjasama di atas. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara- negara tetangganya, termasuk Indonesia juga melakukan kerjasama ini. Ada banyak sekali kerjasama regional yang tersebar di seluruh dunia, dan masing- masing kerjasama tersebut memiliki tujuan dan maksudnya masing- masing. Namun ada beberapa hal yang biasanya menjadi poin penting kerjasama regional. Dan poin- poin ini menjadi bagian dari hasil kerjasama regional tersebut.

#### **Pokok Bahasan Kerjasama Regional**

Mengenai isi kerjasama regional, sebenarnya hal ini tidak bisa dibakukan mengingat isi perjanjian atau kerjasama merupakan hak dari pelaku kerjasama. Dan masing- masing kerjasama internasional pun memiliki isi atau bahasannya masing- masing. Namun biasanya ada beberapa poin yang menjadi pokok bahasan dalam kerjasama regional. Poin- poin inilah yang akan

menjadi hasil dari kerjasama regional. Biasanya dari bahasan- bahasan akan memunculkan kebijakan- kebijakan tertentu. Beberapa kebijakan yang biasanya muncul sebagai hasil dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut:

- Penetapan peraturan serta perjanjian penanaman modal untuk memperkuat posisi tawar-menawar negara anggota ketika menghadapi negara yang lebih maju
- Melakukan proteksi terhadap pengusaha domestik dalam menghadapi persaingan yang berasal dari luar kawasan
- Pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan tarif bea masuk terhadap barang yang berasal dari sesama negara anggota untuk meningkatkan skala pasar internasional.

Itulah beberapa poin yang sekaligus menjadi suatu kebijakan yang biasa ada dalam suatu kerjasama regional. Tujuan utama dari kerjasama regional ini tentunya adalah menyejahterakan negara- negara yang termasuk ke dalam anggotanya.

Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan dua negara atau lebih yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Ada beberapa organisasi kerjasama yang berada pada masing-masing kawasan. Di kawasan Asia Tenggara ada Asean, Apec, dan Afta, di kawasan Asia terdapat ADB, di kawasan eropa terdapat EU dan EFTA. Masing-masing kerjasama tersebut memiliki tujuan masing-masing. Indonesia sebagai bagian dari negara-negara dunia selalu aktif melakukan kerjasama dengan negara lain dalam satu kawasan. Ada beberapa alasan Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara lain:

1. Tidak semua kebutuhan konsumsi dalam negeri dapat dipenuhi sendiri
2. Ada produk/jasa yang lebih menguntungkan jika diimpor daripada diproduksi di dalam negeri
3. Untuk memasarkan produksi dari dalam negeri (ekspor).

4. Sebagai bagian dari komunitas dunia, Indonesia perlu menjalin persahabatan dengan negara lain
5. Untuk menjaga stabilitas kawasan, meningkatkan hubungan ekonomi.

Berikut ini adalah contoh beberapa kerjasama regional baik yang ada di kawasan asia dan kawasan Eropa.

### 1. Asean

Asean (Association of Southeast Asian Nations) atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara). Organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerja sama regional negara-negara di Asia Tenggara. Asean beranggotakan negara-negara Asia Tenggara: Brunei Darusalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam.



### 2. Apec

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Kerjasama Ekonomi APEC adalah forum kerjasama ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat, dibentuk di Canberra November 1989. Keanggotaan APEC terdiri 21 ekonomi. Australia, Brunai Darussalam, Kanada, Cili, Republik Rakyat Cina, Hongkong-Cina, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, Taiwan-Cina Taipei, Thailand, Amerika Serikat, Peru, Rusia, Vietnam. Salah satu dalam APEC adalah Kerjasama Ekonomi dan Teknik (ECOTECH) Program ini mencakup memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan dalam perdagangan internasional.

## **2. AFTA**

AFTA (Asean Free Trade Area) adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN yang bertujuan menciptakan area perdagangan bebas di kawasan ASEAN. AFTA dibentuk pada bulan Januari 1992. Pembentukan AFTA bertujuan untuk meningkatkan spesialisasi di negara anggota ASEAN, meningkatkan kegiatan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Konsep AFTA adalah penurunan tarif perdagangan antarnegara ASEAN sehingga menurunkan biaya ekonomi.

Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA.

## **4. ADB**

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Bank ini didirikan pada 1966 dengan 31 negara anggota dan kini telah berkembang menjadi 63 negara. Antara lain sebagai berikut :

-Wilayah Asia dan Pasifik : Afganistan, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Kep. Cook, Fiji, Hong Kong, China, India, Indonesia, Jepang, Kazakhstan, Kiribati, Kyrgyzstan, Lao PDR, Malaysia, Maladewa, Kepulauan Marshall, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Palau, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Singapura, Kepulauan Solomon, Korea Selatan, Sri Lanka, Taipei, China (Taiwan), Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam

- Dari wilayah lain : Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki(Eropa). Kanada, Amerika Serikat (Amerika).

## 5. EU

Uni Eropa (European Union) adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. Uni Eropa bukanlah sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, melainkan sebuah badan otonom di antara keduanya. Negara-negara anggotanya tetap menjadi negara yang berdaulat dan independen, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dengan maksud untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Uni Eropa memiliki 28 negara anggota, yaitu Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Britania Raya, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Bulgaria, dan Rumania, Kroasia.

## 6. EFTA

Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association) didirikan tanggal 3 Mei 1960 sebagai sebuah blok dagang-alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu, atau memilih tidak untuk bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa. Konvensi EFTA ditandatangani tanggal 4 Januari 1960 di Stockholm oleh tujuh negara. Hari ini hanya Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein yang masih menjadi anggota EFTA (karena Norwegia dan Swiss adalah anggota pendiri). Konvensi Stockholm digantikan oleh Konvensi Vaduz.

## BAB VII

### MUDIK MENUMBUHKAN EKONOMI REGIONAL

Dalam hitungan beberapa hari ke depan, umat Islam di seluruh Indonesia akan merayakan hari kemenangan Idul Fitri 2018, sebagai mana tahun-tahun sebelumnya, aktivitas mudik telah menjadi budaya yang tak dapat dilewatkan.

Aktivitas mudik kini tidak hanya dimanfaatkan oleh umat Islam semata, namun telah menjadi aktivitas “bersama” bagi seluruh warga Indonesia, yang semakin mendapatkan momentum dengan adanya penambahan waktu cuti bersama.

Tradisi mudik ditambah dengan adanya cuti bersama menjadikan moment Hari Raya Idul fitri tidak hanya sebagai sebuah peristiwa sosial budaya dan religius, tetapi juga telah bertransformasi menjadi fenomena yang memberi manfaat nyata dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional.

Mudik membawa konsekuensi meningkatnya mobilitas masyarakat ke kampung halamannya masing-masing, diiringi dengan peningkatan jumlah uang beredar, serta peningkatan konsumsi yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi produktif dan sektor riil di daerah.

Meningkatnya aktivitas mudik sekaligus sebagai cerminan meningkatnya kelas menengah dan mulai dirasakan nyata manfaat dari perbaikan infrastruktur konektivitas nasional, seperti perbaikan infrastruktur jalan raya, jalan tol, pelabuhan dan bandara.

Menurut prediksi Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik 2018 kali ini diperkirakan akan mencapai 19,50 juta orang, atau mengalami kenaikan sebesar 5,17% dari jumlah pemudik tahun 2017 yang berjumlah 18,60 juta orang.

Sementara menurut catatan Bank Indonesia, kebutuhan peredaran uang kartal selama Ramadan dan Lebaran 2018 ini sebesar Rp188,2 triliun. Angka itu mengalami peningkatan sebesar 15,3 persen dari Ramadan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp163,2 triliun, Kebutuhan peredaran uang kartal selama periode Ramadan dan Lebaran tahun ini melebihi rata-rata tahun-tahun sebelumnya.

Data dalam 5 tahun terakhir, 2013-2017 menunjukkan peningkatan outflow [peredaran uang] Ramadan Idul Fitri mencapai 13,9 persen per tahun, atau rata-rata uang beredar selama periode Ramadan dan Lebaran mencapai 25 persen dari total tahunan. Berdasarkan sebaran wilayah, peredaran uang tertinggi berada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur mencapai 43,7 persen. Lalu, untuk Jabodetabek 22,8 persen, Sumatera 19,9 persen dan kawasan timur 18,9 persen.

Dashyatnya peningkatan jumlah pemudik dan uang beredar selama mudik lebaran, yang kumulatifnya terus bergerak naik dari tahun ke tahun, secara teori apabila dikelola secara baik akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Semakin besar jumlah uang yang beredar maka perekonomian makin tumbuh positif, dengan demikian, daya beli masyarakat juga akan menggeliat. Potensi ini harus dikelola oleh pemerintah daerah dan pelaku ekonomi, dengan mendorong berkembangnya aktivitas investasi dan kegiatan ekonomi produktif, terutama investasi di bidang pertanian, mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi kreatif maupun pariwisata lokal.

Ekonomi mudik, dari konsumtif ke produktif Fenomena mudik tak terbantahkan sebagai peluang dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi regional, apabila dapat dibarengi dengan perencanaan strategik oleh pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha, yang mengarah ke pengembangan investasi dan kegiatan ekonomi produktif.

Setidaknya ada 4 alasan utama yang melatarbelakanginya, Pertama, Mudik akan memacu tumbuhnya sektor riil, yang meliputi mayoritas aktivitas ekonomi masyarakat, seperti makanan, minuman, pusat oleh-oleh dan kerajinan.

Kedua, Mudik akan mempercepat redistribusi ekonomi dari kota besar ke daerah , dengan Cash Flow dari tradisi mudik yang meningkat pesat dari tahun ke tahun, apabila dapat diterjemahkan sebagai peluang pertumbuhan ekonomi regional, akan memiliki multiplier effect menstimulasi aktivitas produktif masyarakat, ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah, seperti penjualan oleh-oleh di rest area, lokasi wisata serta sektor riil dan jasa lainnya.

Ketiga, Mudik akan membawa pertumbuhan investasi di pedesaan, yang dapat menggerakkan semua sektor ekonomi di bidang peternakan, usaha kecil, industri rumahan, perikanan, bahkan di dalam bidang perdagangan.

Keempat , mudik juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yakni melalui peningkatan konsumsi, mengingat sejak tahun 2016, pertumbuhan konsumsi rumah tangga belum menggembirakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi hanya berkisar 5 persen sejak tahun itu. Padahal, konsumsi rumah tangga menyumbang 56,13 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2017.



Besarnya aliran dana mudik sudah seyogyanya tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi konsumtif, yang hanya bersifat jangka pendek semata, diperlukan terobosan dan inovasi sehingga mudik dapat menjadi momentum dalam menggerakkan perekonomian regional.

Pemerintah daerah harus melihat pemudik sebagai “investor domestik” sehingga perlu memfasilitasi berbagai event atau forum, yang menawarkan beragam potensi daerah, seperti wisata, UMKM, ekonomi kreatif dan lain-lain, yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah harus mampu mentransformasi peluang ekonomi mudik dan pemudik sebagai “investor lokal” dalam pengembangan ekonomi daerah, dengan terus meningkatkan penyelenggaraan berbagai event atau media promosi daerah yang menyebar di berbagai pusat-pusat keramaian/tempat-tempat wisata yang menjadi tujuan para pemudik.

Forum Silaturahmi mudik seyogyanya dapat pula menjadi ajang untuk transfer knowledge dan entrepreneurship kepada masyarakat di daerah dalam mengembangkan aktivitas ekonomi produktif masyarakat daerah, sehingga memberi manfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Dengan demikian diharapkan aktivitas mudik menjadi moment dalam mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang berkualitas. Semoga. Selamat Idul Fitri 1439 H, mohon maaf lahir batin.

## BAB VIII

### Peranan Ekonomi Regional dalam Pembangunan Wilayah

Ketika ekonomi perkotaan dan regional mulai berkembang menjadi sebuah cabang ilmu ekonomi yang terpisah (dasawarsa 1950 dan 1960an), sebagian besar ekonom yang memiliki minat di bidang ini berpikir bahwa cabang ilmu ekonomi perkotaan dan regional benar-benar berbeda dengan cabang ilmu ekonomi lainnya. Namun, perkembangan selanjutnya (pada akhir dasawarsa 1960 dan awal 1970an) menunjukkan bahwa cabang ilmu ekonomi perkotaan dan regional sebenarnya merupakan suatu bagian yang vital dari disiplin ilmu ekonomi secara keseluruhan dan terkait dengan disiplin ilmu lainnya. Selain itu, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa teori serta metode yang digunakan oleh para ahli geografi, khususnya ahli ekonomi geografi, tidak berbeda jauh dengan yang digunakan oleh para ahli ekonomi perkotaan dan regional di dalam pembahasan kewilayahan.

Carl J. Sinderman, seorang ahli biologi dalam bukunya *The Joy of Science* menjelaskan bahwa, “*what a beautiful blueprint for action! What a fraud! There is no single scientific method. Reality, for most professionals, is far sloppier than the neat textbook ‘scientific method,’ and follows no single pathway*”. Sinderman, ingin menekankan bahwa masing-masing

ilmuwan tidak perlu memperdebatkan metode ilmiah yang paling benar. Beragam metode dengan pendekatan yang berbeda, tetap dapat memberi kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Saat ini, banyak ilmuwan yang tertarik dengan bidang atau kajian yang serupa, walaupun menggunakan metode ilmiah yang berbeda. Integrasi dari semua karya ilmiah yang dikerjakan di masing-masing bidangnya yang justru memajukan pengetahuan dan bukan hanya hasil kajian ilmu tertentu saja.

Pernyataan di atas bukan untuk menjelaskan bagaimana analisis kewilayahan harus mengikuti berbagai aturan positivisme ilmiah, tetapi lebih untuk mempertegas bahwa tidak hanya satu metode ilmiah saja yang dapat digunakan. Lebih baik jika kita peduli terhadap manfaat analisis kewilayahan sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan kewilayahan, dan tidak memperdebatkan metode ilmiah yang digunakan masing-masing ilmuwan. Analisis kewilayahan lebih merupakan sebuah pendekatan berbagai teori, kebijakan, dan perencanaan sosial yang terintegrasi.

Pemahaman tentang kekuatan ekonomi dibalik perkembangan suatu wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam menyusun perencanaan pengembangan wilayah. Dalam kenyataannya selama ini, aspek teknis memiliki porsi peranan yang lebih besar ketimbang aspek lainnya, seperti ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut saat ini mulai berubah dimana perencanaan wilayah tidak lagi mengabaikan unsur perkembangan ekonomi dan sosial, karena adanya fenomena bahwa suatu wilayah akan berkembang dan terpolarisasi sebagai akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, Kota London yang dikenal sebagai pusat aktivitas finansial dunia, berkembang menjadi Greater London karena munculnya aktivitas-aktivitas ekonomi dan sosial yang baru di sekitar wilayah pinggirannya. Perkembangan aktivitas tersebut bahkan tidak mampu diprediksi sebelumnya, sehingga sempat terjadi

penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, perencanaan wilayah memang mutlak melibatkan sudut pandang yang bersifat multi dimensi sehingga pengaturan ruang memang sesuai perkembangan alamiah suatu wilayah.

Dalam perkembangannya, konsep mengenai perencanaan wilayah terus mengalami evolusi. Penerapan prinsip-prinsip *laissez-faire*, dimana pasar dibiarkan bebas bekerja sehingga campur tangan pemerintah dalam bentuk perencanaan tidak banyak dibutuhkan, ternyata tidak tepat lagi dalam konteks pembangunan wilayah modern. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum tentu dapat mengatasi semua permasalahan yang muncul dan dibutuhkan campur tangan pemerintah yang lebih luas lagi. Dengan adanya intervensi pemerintah dalam bentuk penyusunan perencanaan maka diharapkan alokasi sumberdaya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat.

Berbagai macam persoalan yang dapat muncul akibat adanya dominasi prinsip-prinsip *laissez-faire*, antara lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali, distribusi pendapatan yang tidak merata, terbatasnya penyediaan barang-barang publik, masalah pengangguran, ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi, tingkat kriminalitas yang tinggi, kesemrawutan tata ruang. Berbagai masalah ini akan semakin parah jika campur tangan pemerintah dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Berbagai deskripsi di atas menunjukkan pentingnya peranan ekonom regional dalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayah. Bagaimanapun juga, pemahaman terhadap suatu wilayah harus dilandasi oleh pemahaman tentang aktivitas ekonomi apa saja yang ada di dalam wilayah tersebut, termasuk bagaimana aktivitas tersebut bisa terbentuk. Penentuan lokasi yang dilakukan para agen ekonomi (perusahaan dan rumah tangga) tentunya didasarkan pada rasionalitas yang mereka miliki. Ekonom regional memiliki berbagai peralatan analisis yang

dapat digunakan untuk mengukur dan menganalisis mengapa terbentuk suatu aktivitas ekonomi, dimana aktivitas tersebut terbentuk, bagaimana aktivitas tersebut dapat berkembang, dan apa dampak ekonomi dari perkembangan aktivitas tersebut dalam konteks spasial. Analisis yang

dilakukan oleh para ekonom regional tidak terbatas hanya untuk memahami aktivitas ekonomi di dalam suatu wilayah saja, tetapi juga mencoba mengidentifikasi keterkaitan dan interaksi antar wilayah. Berbagai alat analisis seperti model *input-output*, *economic base theory* dan *shift-share analysis*, sistem neraca sosial ekonomi (*social accounting matrix*), model keseimbangan umum (*general equilibrium model*), model gravitasi, berbagai indeks ketimpangan wilayah, maupun ekonometrika spasial menjadi kekuatan yang dimiliki para ekonom regional dalam menganalisis ekonomi wilayah dengan baik.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pembangunan wilayah di Indonesia harus dilaksanakan secara terpadu dengan menyusun perencanaan dari sudut pandang pengembangan wilayah (*regional development*). Secara teoritis pembangunan wilayah harus dapat menyeimbangkan kepentingan lokal dengan tujuan nasional secara keseluruhan. Keterpaduan kepentingan tersebut melibatkan keterpaduan antar sektor, baik sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor non-ekonomi dan antara kawasan rural maupun urban. Dalam konteks pembangunan wilayah, ekonom regional dapat berperan untuk menganalisis kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonomi di masa mendatang. Ini dapat membantu para perencana teknis untuk merencanakan pembangunan infrastruktur sesuai arah kebutuhan aktivitas yang diinformasikan oleh para ekonom regional. Tanpa kerjasama antara ekonom regional dengan para perencana, pembangunan wilayah dapat menempatkan aktivitas di ruang yang salah.

Saat ini, para ekonom regional menggunakan pendekatan baru dalam konteks penyusunan perencanaan wilayah. Mereka tidak lagi sekedar percaya pada historical data untuk mengamati perilaku ekonomi yang ada di suatu wilayah. Salah satu kelemahan para perencana wilayah di masa lalu ialah adanya keyakinan dari mereka bahwa perilaku ekonomi wilayah di masa lalu dapat menjadi acuan dalam merencanakan masa depan suatu wilayah. Ini ibarat melihat kaca spion ketika mengemudi, dengan harapan bahwa jalan yang akan dilalui di depan, sama polanya dengan jalan yang telah dilewati. Akibatnya, perencanaan wilayah seringkali mengalami kendala karena kesalahan di dalam memprediksi masa depan. Oleh karenanya, para ekonom regional saat ini menggunakan kombinasi antara traditional tools dengan pendekatan modern seperti *multi sector analysis* (MSA) dan cluster analysis. Salah satu penekanan dalam pendekatan modern ini ialah adanya keyakinan bahwa setiap perencanaan wilayah harus didesain untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian di masa mendatang. Hal ini mengingat semakin tingginya derajat ketidakpastian (*uncertainty*) perekonomian dan kondisi iklim dunia, sehingga kemampuan antisipasi lebih penting ketimbang sekedar mengikuti pola perilaku yang sudah ada.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak mungkin dalam mengembangkan wilayah hanya menggunakan satu pendekatan ilmu atau metode saja. Peranan ekonom regional merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam perencanaan maupun analisis pengembangan wilayah, dan sama pentingnya dengan peran para perencana dari disiplin ilmu non-ekonomi. Karakteristik setiap wilayah tentunya tidak sama, sehingga membutuhkan kejelian dan kemampuan intuisi para perencana wilayah untuk mengkombinasikan berbagai pendekatan ilmu yang ada.

## **BAB IX**

### **TOL SUMATRA MENUMBUHKAN EKONOMI REGIONAL**

Strategi pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan *grand design* pertumbuhan ekonomi yang disasar, dimana pembangunan ekonomi diarahkan agar selalu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, melalui manajemen strategik yang fokus dan berorientasi pada hasil, guna memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki daya ungkit terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagi suatu negara, pembangunan ekonomi sejatinya merupakan suatu proses peningkatan pendapatan per kapita maupun pendapatan total suatu negara, dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan perubahan fundamental pada struktur ekonomi, daya adaktif terhadap perubahan internal dan eksternal geostrategis dan geoeconomis untuk menaikkan posisi tawar dalam persaingan antar bangsa.

Secara sederhana pendapatan total suatu negara dapat dicermati dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai, sebagai suatu ukuran kuantitatif atau proses peningkatan kapasitas produksi, yang diwujudkan dengan peningkatan pendapatan nasional dalam suatu tahun tertentu.

Peningkatan pendapat nasional menjadikan pertumbuhan ekonomi regional menjadi suatu keniscayaan, sebagai salah satu pilihan strategis dalam memformulasikan pembangunan

ekonomi regional dan pemenuhan prasyarat yang dibutuhkan, utamanya dalam mengoptimalkan daya saing dan nilai tambah sumber daya pada suatu wilayah, hal inilah yang menjadi fokus kajian ilmu ekonomi regional.

Perkembangan Ilmu ekonomi regional merupakan kritik serta inovasi baru dalam hal menganalisa ekonomi, dengan tujuan melengkapi serta membenahi pemikiran ekonomi tradisional, sebagai jawaban terhadap penyelesaian masalah ekonomi regional, peningkatan daya saing dan nilai tambah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat setempat.

Pertumbuhan ekonomi regional menjadi faktor determinan dalam Ilmu ekonomi regional yang juga bisa diartikan sebagai ilmu ekonomi wilayah, karena berkaitan dengan suatu wilayah, dan menitikberatkan pada pembahasan tata ruang, space dan spatial serta infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengakselerasi Bergeraknya ekonomi regional dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.

### **Memacu pembangunan infrastruktur Tol Sumatra**

Bagi Indonesia pembangunan infrastruktur yang masif dan tersebar merata pada berbagai wilayah regional, sangat diperlukan guna memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik di jangka menengah maupun jangka panjang. Urgensi percepatan pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan mengingat kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh dari kondisi ideal.

Hal ini menjadi sangat relevan bila merujuk pada hasil studi Bank Dunia, Bloomberg dan McKinsey pada 2013, yang menggambarkan kondisi sesungguhnya infrastuktur Indonesia, dimana bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia yang rata-rata memiliki stok infrastuktur sebesar 70% dari PDB, sedangkan Indonesia sangat kontras dengan stok infrastuktur hanya 38% dari PDB atau masuk kategori rendah.



Selain itu, bila dibandingkan dengan masa sebelum krisis ekonomi Asia di '1997, jumlah stok infrastruktur Indonesia juga menunjukkan kecenderungan menurun dari 49% dari PDB di tahun 1995 menjadi 38% dari PDB di tahun 2012.

Belum lagi bila kita berbicara tentang ketimpangan infrastuktur Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia bagian Barat dan Timur, ketimpangan inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa investasi khususnya manufaktur, lebih banyak berada di Pulau Jawa.

Kondisi infrastruktur tersebut merupakan salah satu isu strategis yang perlu ditangani secara fokus agar dapat memacu pertumbuhan perekonomian Indonesia, rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur tersebut membuat suplai/produksi perekonomian tidak dapat mengikuti kecanggihnya pertumbuhan dari sisi permintaan/konsumen, disamping itu juga akan melemahkan daya saing nasional.

Dalam laporan terbaru *Global Competitiveness Index 2017* juga menyebutkan masalah utama daya saing Indonesia salah satunya disebabkan belum meratanya sarana infrastruktur, jadi menjadi relevanlah pilihan strategis dengan menjadikan akselerasi infrastruktur sebagai ujung tombak guna memacu pertumbuhan ekonomi regional.

Memacu pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan pilihan strategis yang tepat dalam memacu bergeraknya pertumbuhan ekonomi regional, hal ini sejalan dengan hasil estimasi yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2010).

Terdapat korelasi antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan PDRB, yang menunjukkan bahwa Infrastruktur panjang jalan memiliki tingkat elastisitas sebesar 0,13 artinya setiap kenaikan panjang jalan sebesar 1% akan meningkatkan output (PDRB) sebesar 0,13%, ceteris paribus.

Dari berbagai data tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur, utamanya jalana tol merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi prasyarat yang harus dipenuhi dalam kerangka pembangunan nasional yang inklusif.

Secara fungsional pembangunan jalan tol dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan jasa distribusi produk kegiatan ekonomi dari pusat pengolahan ke pusat pemasaran, jika dilihat secara makro, pembangunan jalan tol diyakini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dengan menggerakkan roda perekonomian.

Secara tidak langsung, investasi jalan tol akan menimbulkan efek penggandaan (*multiplier effect*) berupa berkembangnya sektor-sektor lain yang akan mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, kualitas sumber daya, penerimaan pemerintah daerah hingga perkembangan wilayah.

Kita patut bersyukur akselerasi pembangunan tol di luar Jawa akan terus menjadi fokus perhatian di era pemerintahan Presiden Jokowi, sebagai pilihan strategis dalam terus memacu pertumbuhan ekonomi regional, khususnya di luar Jawa sebagai perwujudan pembangunan Indonesia Sentris.

Program strategis nasional dalam mengakselerasi pembangunan Tol Sumatra merupakan pilihan cara yang ditempuh dalam memastikan tumbuhannya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang lintasan Tol Sumatra, mengefesiensikan biaya logistik guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Nilai strategis akselerasi pembangunan Tol Sumatra diyakini akan mampu mendongkrak tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat karena akan meningkatkan distribusi barang dan jasa, menumbuhkan kawasan industri, pariwisata, meningkatkan kualitas ekonomi, menarik

investor berinvestasi sesuai dengan potensi ekonomi setempat sehingga dapat memperluas lapangan kerja.

Tol Sumatera juga akan mempermudah pengiriman logistik di berbagai daerah, terjadi efisiensi biaya logistik yang dapat meningkatkan daya saing produk lokal, disamping itu, efisiensi kendaraan karena adanya tol Trans Sumatera diperkirakan mencapai Rp 2,23 triliun per tahun, kumulatif manfaat dari *permanen impact* tol Trans Sumatera diperkirakan bisa mencapai Rp 769,5 triliun.

Untuk itu diperlukan adanya kesatuan pandangan (*shared vision*) dari seluruh pemangku kepentingan baik, pada pemerintah pusat dan daerah serta kalangan swasta dalam mengoptimalkan dukungan dan langkah konkrit, guna memastikan berkontribusi positif dalam akselerasi penyelesaian pembangunan Tol Sumatera.

*Shared vision* sangat diperlukan untuk memastikan proyek ini segera terealisasi dan tuntas sesuai jadwal, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah Sumatera yang diproyeksikan akan ikut terkerek naik, jalan tol Sumatera akan berkontribusi dalam menyumbangkan 15% dari total pertumbuhan ekonomi daerah.

Kita patut bersyukur bahwa tonggak sejarah pengerjaan jalan tol Sumatera sepanjang 2.048 kilometer, telah dimulai, ditandai dengan groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunannya pada tanggal 30 April 2015 dan bergeraknya percepatan pembangunan Tol Sumatera telah ditandai dengan diresmikannya ruas Bakauheni-Terbanggi Besar oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2018.

Dari total sepanjang 140,9 kilometer, pembangunan tol yang sudah selesai konstruksinya mencapai 14,5 kilometer, tol ini mencakup Bakaheuni-Terbanggi Besar Paket 1 Bakauheni-Sidomulyo, yaitu Segmen Pelabuhan Bakauheni-Simpang Susun (SS) Bakauheni sepanjang 8,9

kilometer serta Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru, yakni Segmen SS Lematang-SS Kotabaru sepanjang 5,6 kilometer.

Meskipun capaian pembangunan Tol Sumatera masih jauh dari target yang ditetapkan, namun kita perlu mengapresiasi capaian pembangunan konstruksinya, meskipun masih jauh dari ideal, namun setidaknya langkah awal telah dimulai dan terlihat nyata hasilnya.

Terbangunnya infrastruktur Tol Sumatra diyakini akan memberikan dampak pengganda atau *multiplier effect* pada daerah yang terlewati jalur Tol Sumatra dimaksud, Tol Tans Sumatera diharapkan membangkitkan ekonomi Sumatra terutama dalam hal penyumbang PDB nasional, meskipun jujur diakui bahwa potensi keuntungan (Internal Rate of Return (IRR) masih sangat kecil, namun Tol Sumatera adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi bila kita ingin meningkatkan daya saing ekonomi.

Kita tentunya berharap dengan telah diresmikan diresmikannya ruas Bakauheni-Terbanggi Besar oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2018, akan dapat diikuti dengan langkah konkret dari berbagai pemangku kepentingan dalam berkontribusi positif mendukung percepatan penyelesaian pada ruas-ruas jalan tol lainnya yang membelah Sumatera dari Lampung sampai dengan Aceh sehingga dapat mendukung integrasi ekonomi nasional.

Untuk itu diharapkan adanya kesungguhan dan fokus dari berbagai pemangku kepentingan pusat dan daerah serta penanggungjawab setiap kegiatan, guna memastikan masalah ditingkat lapangan dapat diatasi segera dengan tenggat waktu yang terukur dan pasti, fokus perlu terus ditingkatkan, utamanya terkait percepatan pembebasan lahan yang menjadi isu utama, langkah-langkah persuasif dialog dengan warga terdampak perlu terus dikedepankan.

Langkah terobosan dan inovasi seyogyanya terus dikembangkan guna memastikan percepatan penyelesaian mekanisme konsinyasi, demikian pula dengan percepatan pengadaan tanah yang

terdapat utilitas, seperti pipa gas, tower listrik, dan kabel listrik, sikap saling menunggu dan ego sektoral harus dapat dihilangkan, perlu mengutamakan berpikir strategis dan mengedepankan kepentingan yang lebih besar akan manfaat percepatan pembangun Tol Sumatera.

Kita tentunya berharap berbagai permasalahan di tingkat operasional lapangan yang berpotensi menghambat akselerasi Pembangunan Tol Sumatera dapat terus dieliminir dengan menerapkan pengendalian dan pengawasan yang ketat khususnya pada tataran implementasi, guna memastikan percepatan dan langkah mitigasi jangka pendek dapat secara diambil bila ditemukan hambatan di tingkat lapangan.

Akselerasi pembangunan Tol Sumatera diharapkan dapat mempercepat integrasi ekonomi dan konektivitas nasional yang akan menurunkan biaya logistik, menumbuhkan pusat-pusat industri dan ekonomi baru, sekaligus meningkatkan daya saing regional sehingga mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi regional sebagai perwujudan pembangunan inklusif. Semoga.

## BAB X

### Dampak Kelompok Pengungsi Bagi Kemajuan Ekonomi Regional Australia

Selasa, 25 September 2018 – 10:00 WIB



Memukimkan kembali para pengungsi dari Asia Tenggara ternyata telah memberi manfaat besar bagi sebuah kota regional di negara bagian Victoria di Australia.

Ini adalah salah satu kesimpulan penelitian mengenai dampak kehadiran pengungsi asal Karen bagi kota Bendigo, yang terletak sekitar 150 km utara Melbourne.

Warga Karen adalah warga etnis minoritas asal Myanmar, dengan belasan ribu diantara mereka tinggal di kamp pengungsi di perbatasan negara itu dengan Thailand.

Mereka yang tidak lahir di kamp pengungsi bekerja sebagai petani di desa-desa di kawasan pegunungan di Myanmar.

Sejak tahun 2007 ketika keluarga pertama pengungsi Karen tiba di Bendigo, komunitas di sana sekarang tumbuh menjadi sekitar 1000 orang.

Sensus terbaru yang dilakukan tahun 2016 menemukan bahwa Karen adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di Bendigo setelah bahasa Inggris.

Penelitian terbaru yang dilakukan lembaga Deloitte Access Economics dan Adult Multicultural Education Services (AMES) Australia memperkirakan komunitas Karen sudah menyumbangkan sekitar \$67,1 juta (sekitar Rp 670 miliar) bagi perekonomian Bendigo.

Penelitian juga menemukan adanya 177 lapangan kerja penuh waktu yang diciptakan oleh para pekerja Karen tersebut.

Direktur Eksekutif AMES Australia Cath Scarth mengatakan bahwa hasil penelitian merupakan dukungan bagi pemukiman pengungsi di kawasan regional di Australia.

"Ketika difasilitasi dengan baik, ini bisa memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian, dan juga jaringan budaya dan sosial di komunitas regional." kata Scarth.

Para pengungsi rajin dan setia



**Photo:**

Perusahaan pemotongan ayam Hazeldene di Bendigo mempekerjakan 120 staf dari kalangan warga Karen. (ABC Central Victoria: Mark Kearney)

Perusahaan pemotongan ayam di Bendigo Hazeldene paling banyak mempekerjakan warga Karen dengan 120 orang bekerja di sana.

Ann Conway dari perusahaan itu menggambarkan pekerja Karen sebagai mereka yang selalu bekerja keras dan setia.

"Asal pekerja yang berbeda-beda adalah hal yang bagus dari sisi organisasi, dan budaya, karena perbedaan akan meningkatkan motivasi." kata Conway.

"Perbedaan budaya dalam perusahaan malah saling memperkaya dan sudah terbentuk hubungan yang betul-betul harmonis diantara berbagai kebangsaan."

Conway mengatakan meski ada masalah dengan bahasa, beberapa staf asal Karen dibayar untuk bekerja sebagai penterjemah.



Lembaga sosial di Bendigo, seperti Loddon Campaspe Multicultural Services (LCMS) juga berperan dalam membantu para pengungsi Karen untuk beradaptasi dengan kehidupan di Australia.

Direktur Eksekutif LCMS Kate McInnes mengatakan pemukiman kembali para pengungsi ini sudah mengubah komunitas Bendigo, selain juga membantu dalam hal ekonomi.

Perubahan ini sangat penting karena sebelumnya dalam sensus di tahun 2011, Bendigo termasuk salah satu wilayah yang paling tidak beragam dari sisi budaya.

"Saya senang tinggal di wilayah regional., namun juga memiliki banyak budaya berbeda, dimana anak-anak saya bisa bergaul dengan orang dari seluruh dunia. Mereka bisa menikmati festival dari seluruh dunia." kata McInnes.

Meruntuhkan tembok perbedaan



**Photo:** Anggota masyarakat dari komunitas Karen menampilkan tari tradisional di acara budaya di Bendigo.

(ABC Central Victoria: Mark Kearney)

Peningkatan keragaman etnis di Bendigo juga berarti meningkatnya keragamam agama.

Sekarang sebuah vihara Budha sudah berfungsi di Bendigo, sementara gereja Kristen Baptis menyelenggarakan juga kebaktian dalam bahasa Karen.

McInnes mengatakan semakin beragamnya masyarakat di sana juga membantu mengurangi ketegangan agama, seperti protes yang terjadi di tahun 2015 menentang pembangunan mesjid di Bendigo.

"Kita sudah pernah melihat adanya protes dari sebagian masyarakat yang tidak menerima adanya keberagaman." kata McInnes.

"Satu makan malam bersama, atau satu BBQ, atau satu cangkir teh bisa mengubah perilaku kita, karena ada diantara kita yang tidak mendapat kesempatan sebelumnya bertemu dengan orang yang datang ke Australia sebagai pengungsi."

kata McInnes lagi.

Menjalani kehidupan baru



**Photo:** Keluarga Bu Gay merupakan pengungsi Karen pertama yang menetap di Bendigo. (ABC Central Victoria: Mark Kearney)

Sebelas tahun lalu, keluarga Bu Gay Pha Thei menjadi keluarga asal Karen pertama yang tiba di Bendigo, dan sejak itu dia menjadi orang pertama dari komunitasnya yang menyelesaikan pendidikan universitas.

Sekarang bekerja sebagai perawat, Pha Tei bekerja di LCMS sebagai pekerja sosial kemasyarakatan.

Perempuan berusia 24 tahun tersebut mengatakan bangga dengan apa yang sudah dicapai komunitasnya, melihat betapa susahnyanya perjuangan mereka di awal-awal ketibaan mereka.

"Kami tidak memiliki keluarga Karen lainnya yang bisa kami kunjungi di akhir pekan." katanya.

"Susah sekali untuk berkomunikasi, sudah sekali untuk pergi belanja, susah sekali untuk keluar mencari teman."

Pha Thei melihat mengurus warga Karen yang lansia menjadi salah satu tantangan yang dilihatnya perlu diatasi.

"Kami harus banyak memberi dukungan kepada mreka untuk mendapat pelayanan." katanya sambil menambahkan bahwa belajar bahasa Inggris adalah masalah lain yang dihadapi para lansia.

"Anak-anak muda tidak mengalami masalah karena mereka belajar di sekolah, sehingga ada guru-guru yang bisa membantu mereka."

# BAB XI

## MODEL MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL

Beberapa model pembangunan wilayah ini sudah tersebar dalam berbagai literatur. Berikut ini akan dibahas 5 teori (model) pembangunan wilayah yang meliputi, Teori ekonomi basis, teori kutub pertumbuhan, teori pertumbuhan akumulatif, teori lokasi, dan teori dampak aglomerasi (Stimson 2002).

### **1. Teori Ekonomi Basis (*Economic Base Theory*)**

Pendekatan basis membagi perekonomian suatu wilayah ke dalam dua komponen:

- Komponen non-basis, yaitu komponen perekonomian yang melayani masyarakat lokal (konsumsi lokal).
- Komponen basis, yaitu komponen yang memproduksi barang dan jasa melayani permintaan masyarakat luar wilayah (konsumsi ekspor).

Pembedaan kedua komponen tersebut dapat dipakai dalam membuat evaluasi terhadap kebijakan ekonomi suatu wilayah. Wilayah non-basis lebih banyak melayani segmen masyarakat lokal otomatis sebagian besar produk akhir akan terserap pasar lokal. Sebaliknya wilayah basis sebagian besar produk akhir diserap pasar luar wilayah. Menurut aliran ekonomi basis ada hubungan antara ukuran sebuah kota dengan struktur industri. Kota besar lebih mengandalkan komponen basis daripada non-basis.

Pendekatan ekonomi basis percaya bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah hanya akan terjadi jika komponen ekonomi basisnya berkembang karena mempunyai efek multiplier yang besar. Pertumbuhan basis ekspor suatu wilayah akan mendorong masuknya dana ke ekonomi lokal (wilayah).

Dana tersebut berasal dari penjualan produk akhir yang diekspor ke luar daerah. Dana ini kemudian diterima pengusaha dan penduduk lokal yang terlibat dalam proses produksi dan dibelanjakan di wilayah tersebut. Konsumsi masyarakat terhadap produk lokal diharapkan akan merangsang tumbuhnya usaha baru sehingga menciptakan peluang kerja baru. Dengan demikian sektor ekspor akan mendorong aktivitas ekonomi wilayah lebih bergairah.

## **2. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)**

Teori kutub pertumbuhan menganjurkan strategi pembangunan investasi harus dipusatkan pada sektor tertentu yang dianggap menjadi motor penggerak pembangunan wilayah. Sektor ini disebut sebagai sektor kutub pertumbuhan. Sektor yang dianggap sebagai kutub pertumbuhan adalah sektor industri basis yang ada di wilayah tersebut. Dalam pemahaman mereka ketika suatu kutub sektor ekonomi berkembang akan secara otomatis membangun relasi dengan sektor lain sehingga berbagai sektor ekonomi akan turut berkembang.

Prakteknya pembangunan wilayah yang menggunakan strategi kutub pertumbuhan lebih menguntungkan pusat perkotaan. Hampir semua infrastruktur dibangun di daerah urban sehingga otomatis pemusatan industri juga di daerah perkotaan. Dampak penyebaran tidak merata berakibat pada pembangunan yang tidak seimbang (*unbalanced development*). Tentu ini menjadi masalah karena pasti akan terjadi kesenjangan antar wilayah.

Kecemburuan terjadi antar wilayah atau antar sektor dalam wilayah bersangkutan karena strategi kutub pertumbuhan akan menciptakan wilayah atau sektor yang berhasil maju dan wilayah atau sektor yang masih terbelakang (*winners and losers*). Pada umumnya wilayah perkotaan dengan sektor industri selalu lebih maju daripada wilayah pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian. Kesenjangan antar wilayah atau antar sektor mengantar kaum neoklasik melihat strategi

kutub pertumbuhan hanya melancarkan proses eksploitasi suatu wilayah terhadap yang lain atau suatu sektor terhadap sektor yang lain.

### **3. Teori Pertumbuhan Akumulatif (*Accumulative Causation Theory*)**

Teori pertumbuhan akumulatif lebih berorientasi pasar dengan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif terhadap wilayah lain. Untuk itu setiap kebijakan harus mampu menarik modal, ketrampilan, dan kepakaran ke wilayah tersebut. Teori ini memberi kesempatan setiap wilayah bersaing dengan wilayah lain tanpa tenggang rasa. Misalnya, kebijakan wilayah tertentu menyebabkan wilayah lain terbelakang bukan masalah. Proses semacam ini adalah alamiah dan tidak perlu dirisaukan. Model pertumbuhan akumulatif memungkinkan suatu wilayah bertumbuh cepat jika menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat. Namun sebaliknya kebijakan yang keliru berakibat pada merosotnya pertumbuhan ekonomi wilayah. Model ini memberi perhatian pada: *stock entrepreneur*, proses pembelajaran, pendidikan, peningkatan kapasitas kelembagaan, adopsi teknologi, dan perpindahan usaha.

### **4. Teori Lokasi**

Teori lokasi muncul sebagai jawaban terhadap kelemahan teori ekonomi konvensional yang mengabaikan lokasi dalam analisisnya. Salah satu pertanyaan penting adalah mengapa kegiatan ekonomi terpusat di lokasi (daerah) tertentu? Penyebaran kegiatan ekonomi yang tidak merata berakibat pada perbedaan kemakmuran antar daerah. Hipotesis yang dikembangkan para ahli teori lokasi adalah para pelaku usaha mencari lokasi yang menawarkan biaya minimal dan mencari lokasi yang menawarkan kesempatan mendapatkan keuntungan maksimal (Dawkins 2003). Biaya yang dimaksud meliputi biaya transpor, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi lain. Secara singkat mereka yang bergerak dalam dunia usaha cenderung menempatkan usaha mereka

dekat pasar jika biaya transportasi membawa produk akhir ke pasar lebih besar dari biaya transportasi bahan baku ke tempat produksi.

Sebaliknya, mereka akan menempatkan usaha dekat sumber bahan baku jika biaya transpor dan biaya bahan baku perunit lebih tinggi daripada biaya transpor produk akhir ke pasar. Dalam merancang strategi pembangunan wilayah teori lokasi sangat penting dalam memahami keunggulan dan kekurangan sebuah lokasi bagi pengembangan industri tertentu. Teori lokasi memungkinkan para penentu kebijakan mendapatkan alasan mengapa terjadi konsentrasi industri tertentu di wilayah tertentu atau mengapa industri tertentu menyebar di beberapa wilayah. Dengan memahami berbagai faktor penyebab konsentrasi atau faktor penyebab penyebaran industri pemerintah daerah dapat merancang strategi pembangunan dengan lebih baik.

### **5. Teori Dampak Aglomerasi (*Agglomeration Effect Theory*)**

Sebelum membahas dampak aglomerasi ada baiknya kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan aglomerasi. **Aglomerasi adalah** konsentrasi usaha di wilayah tertentu sehingga individu atau dunia usaha bisa mendapat keuntungan. Aglomerasi sering terjadi di wilayah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi. Aglomerasi mempunyai dampak yang positif kepada jenis usaha tertentu seperti:

1. Secara ekonomis aglomerasi memberi manfaat kepada individu atau dunia usaha di wilayah dengan konsentrasi penduduk dan konsentrasi usaha yang tinggi. Hal ini biasanya berlangsung di kota besar.
2. Aglomerasi memungkinkan usaha besar menekan biaya produksi karena mencapai skala ekonomi. Konsentrasi penduduk memungkinkan dunia usaha memproduksi dalam skala besar sehingga bisa menekan ongkos.

3. Konsentrasi penduduk dan jenis usaha di wilayah tertentu memungkinkan dunia usaha dapat memanfaatkan barang dan jasa lokal untuk kepentingan produksi produk akhir. Di sini aglomerasi memungkinkan dunia usaha memproduksi secara efisien baik biaya, waktu, dan tenaga.

Aglomerasi usaha bisa terjadi secara alamiah namun dapat pula direncanakan. Para penentu kebijakan perlu mengetahui dampak aglomerasi terutama dalam pendirian dan pengembangan sentra industri. Banyak sentra industri gagal karena para penentu kebijakan tidak memperhatikan asumsi dasar aglomerasi usaha.

Sebelum membahas ekonomi wilayah lebih lanjut ada baiknya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “wilayah?” Belum ada kesepakatan para ahli tentang definisi wilayah. Aliran pertama adalah *central place theory* mendefinikan wilayah sebagai sebagai suatu tatanan wilayah berdasarkan hirarki. Setiap wilayah mempunyai beberapa kota yang dapat dikelompokkan dalam kota besar dan kota kecil. Pengelompokan ini berdasarkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan sebuah kota. Kota kecil akan mengimpor dari kota besar dan sebaliknya kota besar akan mengekspor ke kota kecil.

### **Rangkuman**

Model pembangunan wilayah diperkenalkan disini dengan tujuan agar setiap wilayah dapat mengadopsi dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing masing. Beberapa model pembangunan wilayah tersebar dalam berbagai literatur. Diantara ini akan dibahas 5 teori (model) pembangunan wilayah yang meliputi, Teori ekonomi basis, teori kutub pertumbuhan, teori pertumbuhan akumulatif, teori lokasi, dan teori dampak aglomerasi.

Pendekatan basis membagi perekonomian suatu wilayah ke dalam dua komponen yaitu komponen non-basis dan Komponen basis. Pendekatan ekonomi basis percaya bahwa



pertumbuhan ekonomi suatu wilayah hanya akan terjadi jika komponen ekonomi basisnya berkembang karena mempunyai efek multiplier yang besar.

Teori kutub pertumbuhan menganjurkan strategi pembangunan investasi harus dipusatkan pada sektor tertentu yang dianggap menjadi motor penggerak pembangunan wilayah. Sektor ini disebut sebagai sektor kutub pertumbuhan.

Sektor yang dianggap sebagai kutub pertumbuhan adalah sektor industri basis yang ada di wilayah tersebut. Dalam pemahaman mereka ketika suatu kutub sektor ekonomi berkembang akan secara otomatis membangun relasi dengan sektor lain sehingga berbagai sektor ekonomi akan turut berkembang.

Teori pertumbuhan akumulatif lebih berorientasi pasar dengan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif terhadap wilayah lain. Untuk itu setiap kebijakan harus mampu menarik modal, ketrampilan, dan kepakaran ke wilayah tersebut.

Hipotesis yang dikembangkan para ahli teori lokasi adalah para pelaku usaha mencari lokasi yang menawarkan biaya minimal dan mencari lokasi yang menawarkan kesempatan mendapatkan keuntungan maksimal

**Aglomerasi adalah** konsentrasi usaha di wilayah tertentu sehingga individu atau dunia usaha bisa mendapat keuntungan. Aglomerasi usaha bisa terjadi secara alamiah namun dapat pula direncanakan. Para penentu kebijakan perlu mengetahui dampak aglomerasi terutama dalam pendirian dan pengembangan sentra industri.

## BAB XII

# PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL

### PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten, atau kota.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincoln Arsyad, 1999).

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal

dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi - institusi baru, pembangunan industri - industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi nasional sejak PELITA I memang telah memberi hasil positif bila dilihat pada tingkat makro. Tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita mengalami peningkatan dari hanya sekitar US\$50 pada pertengahan dekade 1960-an menjadi lebih dari US\$1.000 pada pertengahan dekade 1990-an. Namun dilihat pada tingkat meso dan mikro, pembangunan selama masa pemerintahan orde baru telah menciptakan suatu kesenjangan yang besar, baik dalam bentuk personal income, distribution, maupun dalam bentuk kesenjangan ekonomi.

Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata per tahun tinggi namun pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu ketidakseimbangan pembangunan yang menyolok antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian

timur. Dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, indonesia bagian timur jauh tertinggal dibandingkan indonesia bagian barat.

Tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal yang dapat mendorong proses pembangunan ekonomi di indonesia bagian timur yang jauh lebih baik dibanding pada masa orde baru. Hanya saja keberhasilan pembangunan ekonomi indonesia bagian timur sangat ditentukan oleh kondisi internal yang ada, yakni berupa sejumlah keunggulan atau kekuatan dan kelemahan yang dimiliki wilayah tersebut.

## Bab 13

# Ekonomi Regional: Suatu Perkembangan dalam Ilmu Ekonomi.

---

STRUKTUR RUANG DAN PERWILAYAHAN A. Definisi Ruang APABILA kita menyebut kata ruang, apa sebetulnya yang terbayang dalam benak kita. Apakah ruang itu abstrak atau riil. Kalau abstrak apakah hanya ada dalam khayalan atau bisa lebih konkret dari itu, sedangkan kalau riil maka ruang itu memiliki batas yang jelas dan ciri-ciri yang berbeda antara ruang yang satu dengan ruang lainnya. Ruang bisa berarti sangat sempit tetapi bisa juga sangat luas. Kita bisa membayangkan bahwa ruang hanya sesuatu yang hampa tetapi memakan tempat atau yang terbayang adalah isi yang ada pada ruang tersebut, yang tentunya berbeda antara satu ruang dengan ruang lainnya. Semua benda membutuhkan ruang sehingga salah satu ciri membedakan benda adalah luas ruang yang dibutuhkan oleh benda tersebut. Dengan demikian, ruang adalah tempat untuk suatu benda atau kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan suatu benda atau kegiatan. Dalam hal ini kata 'tempat' adalah berdimensi tiga dan kata benda atau kegiatan berarti benda atau kegiatan apa saja tanpa batas. Kegunaan ruang menjadi terbatas apabila diberi ciri atau karakter tambahan. Misalnya, ruang kelas yang berarti berisi benda ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelas, ruang tamu berisi benda ataupun kegiatan sebagai tempat menerima tamu, dan lain-lain. Tanpa ruang maka suatu benda atau kegiatan tidak mungkin berada di sana. Dalam bahasa Inggris, 109 padanan kata ruang adalah space. Menurut kamus Webster, space dapat diartikan dengan berbagai cara, namun di sini dikutip dua cara: 1. The three

dimensional continuous expanse extending in all directions and containing all matter: variously thought of as boundless or intermediately finite area or room sufficient for or allotted to something.

2. Kamus Random House menulis, space: a particular extent of surface. Dengan demikian, secara umum ruang dapat diartikan dengan tempat berdimensi tiga tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat menampung atau ditujukan untuk menampung benda apa saja. Sebetulnya ada tiga kata yang sering bisa dipertukarkan, yaitu ruang, tempat, dan lokasi. Di antara ketiga kata ini ruang adalah yang bersifat umum, tidak terikat dengan isi maupun lokasi. Tempat sering kali dikaitkan dengan keberadaan suatu benda atau kegiatan yang telah ada atau sering ada di situ. Lokasi terkait dengan posisi apabila di permukaan bumi bisa ditentukan bujur dan lintangnya. Lokasi sering terkait dengan pemberian nama atau karakter atas sesuatu tempat sehingga dapat dibedakan lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Karena ruang bisa menyangkut apa saja yang membutuhkan tempat maka harus ada batasan tentang ruang yang ingin dibicarakan. Dalam hal ini yang ingin dibicarakan adalah ruang sebagai wilayah. B. Ruang Sebagai Wilayah Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, dan yang ada di atas permukaan bumi.

## **Ekonomi Regional dan Pembangunan**

Ketika ekonomi perkotaan dan regional mulai berkembang menjadi sebuah cabang ilmu ekonomi yang terpisah (dasawarsa 1950 dan 1960an), sebagian besar ekonom yang memiliki minat di bidang ini berpikir bahwa cabang ilmu ekonomi perkotaan dan regional benar-benar berbeda dengan cabang ilmu ekonomi lainnya. Namun, perkembangan selanjutnya (pada akhir dasawarsa 1960 dan awal 1970-an) menunjukkan bahwa cabang ilmu ekonomi perkotaan dan regional sebenarnya

merupakan suatu bagian yang vital dari disiplin ilmu ekonomi secara keseluruhan dan terkait dengan disiplin ilmu lainnya. Selain itu, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa teori serta metode yang digunakan oleh para ahli geografi, khususnya ahli ekonomi geografi, tidak berbeda jauh dengan yang digunakan oleh para ahli ekonomi perkotaan dan regional di dalam pembahasan kewilayahan.

Carl J. Sinderman, seorang ahli biologi dalam bukunya *The Joy of Science* menjelaskan bahwa, “what a beautiful blueprint for action!...What a fraud! There is no single scientific method;...Reality, for most professionals, is far sloppier than the neat textbook ‘scientific method,’ and follows no single pathway”. Sinderman, ingin menekankan bahwa masing-masing ilmuwan tidak perlu memperdebatkan metode ilmiah yang paling benar. Beragam metode dengan pendekatan yang berbeda, tetap dapat memberi kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Saat ini, banyak ilmuwan yang tertarik dengan bidang atau kajian yang serupa, walaupun menggunakan metode ilmiah yang berbeda. Integrasi dari semua karya ilmiah yang dikerjakan di masing-masing bidangnya yang justru memajukan pengetahuan dan bukan hanya hasil kajian ilmu tertentu saja.

Pernyataan di atas bukan untuk menjelaskan bagaimana analisis kewilayahan harus mengikuti berbagai aturan positivisme ilmiah, tetapi lebih untuk mempertegas bahwa tidak hanya satu metode ilmiah saja yang dapat digunakan. Lebih baik jika kita peduli terhadap manfaat analisis kewilayahan sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan kewilayahan, dan tidak memperdebatkan metode ilmiah yang digunakan masing-masing ilmuwan. Analisis kewilayahan lebih merupakan sebuah pendekatan berbagai teori, kebijakan, dan perencanaan sosial yang terintegrasi.

Pemahaman tentang kekuatan ekonomi dibalik perkembangan suatu wilayah merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam menyusun perencanaan pengembangan wilayah. Dalam kenyataannya selama ini, aspek teknis memiliki porsi peranan yang lebih besar ketimbang aspek lainnya, seperti ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut saat ini mulai berubah dimana perencanaan wilayah tidak lagi mengabaikan unsur perkembangan ekonomi dan sosial, karena adanya fenomena bahwa suatu wilayah akan berkembang dan terpolarisasi sebagai akibat dari perkembangan aktivitas ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, Kota London yang dikenal sebagai pusat aktivitas finansial dunia, berkembang menjadi Greater London karena munculnya aktivitas-aktivitas ekonomi dan sosial yang baru di sekitar wilayah pinggirannya. Perkembangan aktivitas tersebut bahkan tidak mampu diprediksi sebelumnya, sehingga sempat terjadi penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, perencanaan wilayah memang mutlak

melibatkan sudut pandang yang bersifat multi dimensi sehingga pengaturan ruang memang sesuai perkembangan alamiah suatu wilayah.

Dalam perkembangannya, konsep mengenai perencanaan wilayah terus mengalami evolusi. Penerapan prinsip-prinsip *laissez-faire*, dimana pasar dibiarkan bebas bekerja sehingga campur tangan pemerintah dalam bentuk perencanaan tidak banyak dibutuhkan, ternyata tidak tepat lagi dalam konteks pembangunan wilayah modern. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum tentu dapat mengatasi semua permasalahan yang muncul dan dibutuhkan campur tangan pemerintah yang lebih luas lagi. Dengan adanya intervensi pemerintah dalam bentuk penyusunan perencanaan maka diharapkan alokasi sumberdaya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat.

Berbagai macam persoalan yang dapat muncul akibat adanya dominasi prinsip-prinsip *laissez-faire*, antara lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali, distribusi pendapatan yang tidak merata, terbatasnya penyediaan barang-barang publik, masalah pengangguran, ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi, tingkat kriminalitas yang tinggi, kesemrawutan tata ruang. Berbagai masalah ini akan semakin parah jika campur tangan pemerintah dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Berbagai deskripsi di atas menunjukkan pentingnya peranan ekonom regional dalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayah. Bagaimanapun juga, pemahaman terhadap suatu wilayah harus dilandasi oleh pemahaman tentang aktivitas ekonomi apa saja yang ada di dalam wilayah tersebut, termasuk bagaimana aktivitas tersebut bisa terbentuk. Penentuan lokasi yang dilakukan para agen ekonomi (perusahaan dan rumah tangga) tentunya didasarkan pada rasionalitas yang mereka miliki. Ekonom regional memiliki berbagai peralatan analisis yang dapat digunakan untuk mengukur dan menganalisis mengapa terbentuk suatu aktivitas ekonomi, dimana aktivitas tersebut terbentuk, bagaimana aktivitas tersebut dapat berkembang, dan apa dampak ekonomi dari perkembangan aktivitas tersebut dalam konteks spasial. Analisis yang dilakukan oleh para ekonom regional tidak terbatas hanya untuk memahami aktivitas ekonomi di dalam suatu wilayah saja, tetapi juga mencoba mengidentifikasi keterkaitan dan interaksi antar wilayah. Berbagai alat analisis seperti model input-output, economic base theory dan shift-share analysis, sistem neraca sosial ekonomi (social accounting matrix), model keseimbangan umum (general equilibrium model), model gravitasi, berbagai indeks ketimpangan wilayah, maupun ekonometrika spasial menjadi kekuatan yang dimiliki para ekonom regional dalam menganalisis ekonomi wilayah dengan baik.



Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pembangunan wilayah di Indonesia harus dilaksanakan secara terpadu dengan menyusun perencanaan dari sudut pandang pengembangan wilayah (regional development). Secara teoritis pembangunan wilayah harus dapat menyeimbangkan kepentingan lokal dengan tujuan nasional secara keseluruhan. Keterpaduan kepentingan tersebut melibatkan keterpaduan antar sektor, baik sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor non-ekonomi dan antara kawasan rural maupun urban. Dalam konteks pembangunan wilayah, ekonom regional dapat berperan untuk menganalisis kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonomi di masa mendatang. Ini dapat membantu para perencana teknis untuk merencanakan pembangunan infrastruktur sesuai arah kebutuhan aktivitas yang diinformasikan oleh para ekonom regional. Tanpa kerjasama antara ekonom regional dengan para perencana, pembangunan wilayah dapat menempatkan aktivitas di ruang yang salah.

Saat ini, para ekonom regional menggunakan pendekatan baru dalam konteks penyusunan perencanaan wilayah. Mereka tidak lagi sekedar percaya pada historical data untuk mengamati perilaku ekonomi yang ada di suatu wilayah. Salah satu kelemahan para perencana wilayah di masa lalu ialah adanya keyakinan dari mereka bahwa perilaku ekonomi wilayah di masa lalu dapat menjadi acuan dalam merencanakan masa depan suatu wilayah. Ini ibarat melihat “kaca spion” ketika mengemudi, dengan harapan bahwa jalan yang akan dilalui di depan, sama polanya dengan jalan yang telah dilewati. Akibatnya, perencanaan wilayah seringkali mengalami kendala karena kesalahan di dalam memprediksi masa depan. Oleh karenanya, para ekonom regional saat ini menggunakan kombinasi antara traditional tools dengan pendekatan modern seperti multi-sector analysis (MSA) dan cluster analysis. Salah satu penekanan dalam pendekatan modern ini ialah adanya keyakinan bahwa setiap perencanaan wilayah harus didesain untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian di masa mendatang. Hal ini mengingat semakin tingginya derajat ketidakpastian (uncertainty) perekonomian dan kondisi iklim dunia, sehingga kemampuan antisipasi lebih penting ketimbang sekedar mengikuti pola perilaku yang sudah ada.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak mungkin dalam mengembangkan wilayah hanya menggunakan satu pendekatan ilmu atau metode saja. Peranan ekonom regional merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam perencanaan maupun analisis pengembangan wilayah, dan sama pentingnya dengan peran para perencana dari disiplin ilmu non-ekonomi. Karakteristik setiap wilayah tentunya tidak sama, sehingga membutuhkan kejelian dan kemampuan intuisi para perencana wilayah untuk mengkombinasikan berbagai pendekatan ilmu yang ada dalam ilmu ekonomi

